



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



TAHUN 2020



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



TAHUN 2020

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020” dapat kami selesaikan.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Di samping itu merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perlu diketahui bahwa perhitungan Nilai Capaian Kinerja dan Pengukuran Evaluasi Kinerja menggunakan indikator yang terbatas dan disesuaikan dari data yang tersedia.

Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat dipakai sebagai gambaran tentang Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan merupakan satu di antara upaya sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Kami mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini, yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun mendatang.



BUPATI PASER UTARA,

H. Abdul Gafur Mas'ud. S.E



Ringkasan Eksekutif

Perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur sangat penting untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatan kepada publik. Karenanya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Laporan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020. Secara garis besar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program yang kesemuanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023. Selanjutnya dari RPJMD ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020, serta untuk mengukur kinerja ditetapkan indikator kinerja sasaran.

Hasil capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang ditetapkan Tahun 2020 secara keseluruhan dan detail dituangkan pada lampiran Pengukuran Kinerja laporan ini. Adanya pandemi covid-19 memengaruhi pencapaian kinerja sehingga banyak indikator kinerja sasaran tidak mencapai target, hal ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dengan cara peningkatan kinerja melalui pengembangan inovasi, komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, serta masyarakat.

Berdasarkan nilai capaian kinerja sasaran pada Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki rata-rata nilai capaian kerja sebesar 141,42% dalam kategori “Sangat Berhasil”. Dengan sasaran strategis sebanyak 19 sasaran dan 36 indikator kinerja.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	iii	
Daftar Isi	iv	
BAB I PENDAHULUAN	1	
	1	A. Gambaran Umum Daerah
	4	B. Kedudukan dan Fungsi Organisasi
	5	C. Sumber Daya Aparatur
	7	D. Isu Strategis dan Permasalahannya
	23	E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26	
	26	A. Visi dan Misi
	28	B. Tujuan dan Sasaran
	30	C. Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan
	37	D. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
	44	E. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46	
	46	A. Capaian Kinerja Organisasi
BAB IV PENUTUP	100	
	90	B. Realisasi Anggaran

Lampiran I Rencana Kinerja Tahun 2020

Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2020

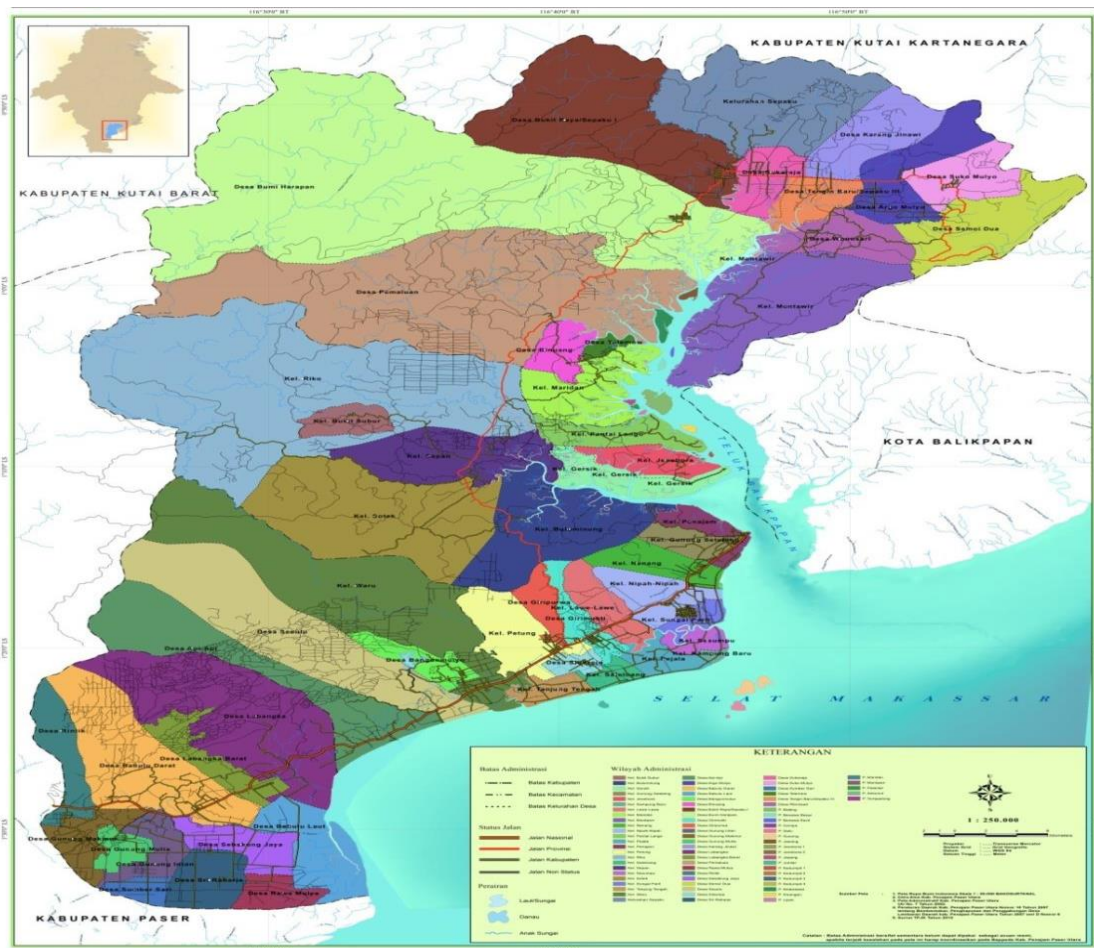
Lampiran III Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Lampiran IV Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A Gambaran Umum Daerah



Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis terletak



antara 00°48'29"-01°36'37" Lintang Selatan dan 116°19'30"- 116°56'35" Bujur Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km² meliputi wilayah daratan seluas 3.060,82 Km² dan wilayah lautan seluas 272,24 Km².

Secara administratif pemerintahan Kabupaten PenajamPaser Utara terbagi atas 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa yang terdiri dari :

**Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2020**

Kecamatan Penajam	Kecamatan Waru	Kecamatan Babulu	Kecamatan Sepaku
Kelurahan Tanjung Tengah	Kelurahan Waru	Desa Gunung Makmur	Kelurahan Maridan
Kelurahan Saloloang	Desa Api-api	Desa Gunung Intan	Kelurahan Mentawir
Kelurahan Lawe-lawe	Desa Sesulu	Desa Sumber Sari	Kelurahan Pemaluan
Kelurahan Pejala	Desa Bangun Mulia	Desa Sri Raharja	Kelurahan Sepaku
Kelurahan Petung		Desa Rawa Mulia	Desa Telemow
Kelurahan Kampung Baru		Desa Sebakung Jaya	Desa Binuang
Kelurahan Sesumpu		Desa Babulu Laut	Desa Bumi Harapan
Kelurahan Sungai Parit		Desa Babulu Darat	Desa Wono Sari
Kelurahan Nipah-nipah		Desa Labangka	Desa Semoi Dua
Kelurahan Nenang		Desa Rintik	Desa Argo Mulyo
Kelurahan Gunung Seteleng		Desa Gunung Mulia	Desa Suko Mulyo
Kelurahan Penajam		Desa Labangka Barat	Desa Tengin Baru
Kelurahan Buluminung			Desa Suka Raja
Kelurahan Sotek			Desa Bukit Raya
Kelurahan Sepan			Desa Karang Jinawi
Kelurahan Riko			
Kelurahan Pantai Lango			
Kelurahan Gersik			
Kelurahan Jenebora			
Desa Girimukti			
Desa Bukit Subur			
Desa Sido Rejo			
Desa Giri Purwa			

Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik, berjumlah 178.681 jiwa. Penyebaran penduduk di masih belum merata di setiap kecamatan. Dengan melihat luas wilayah kecamatan dan

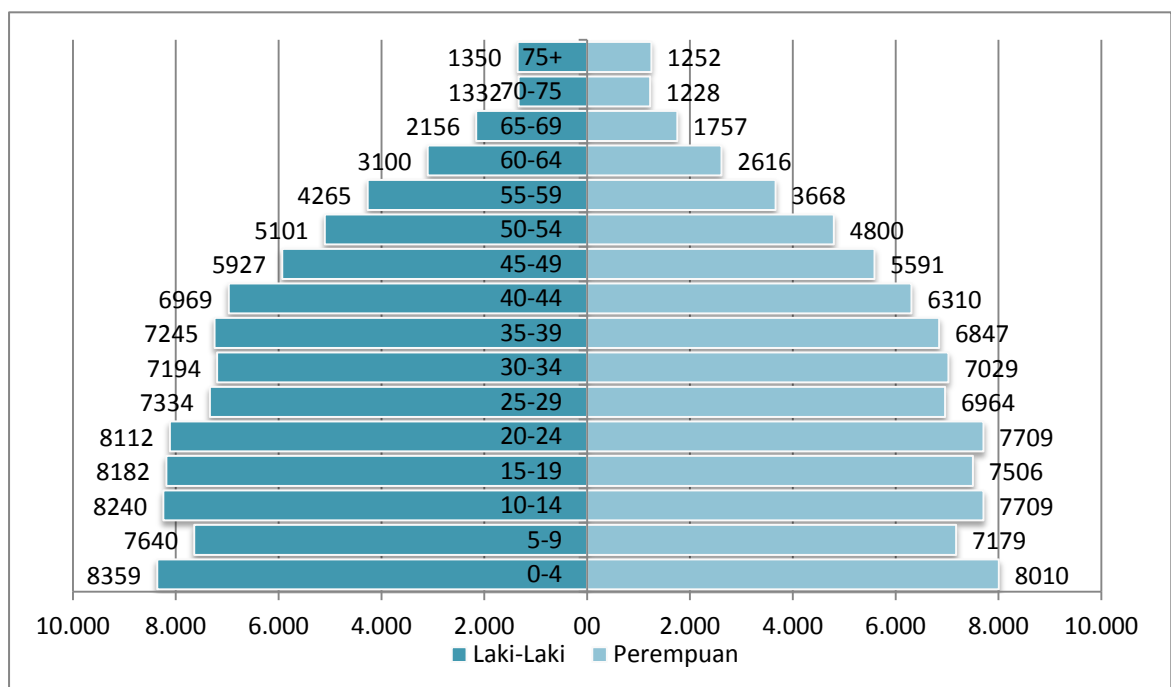


jumlah penduduk, maka dapat dilihat kepadatan penduduk per km², dapat dilihat pada tabel berikut :

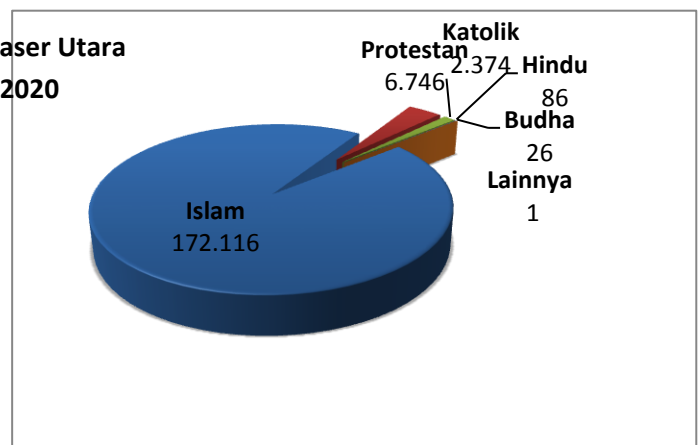
Penyebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020

Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	Kepadatan (per Km ²)
Penajam	399,45	86.040	215,40
Waru	553,88	20.084	36,26
Babulu	1.207,37	36.200	29,98
Sepaku	1.172,36	36.357	31,01
	3.333,06	178.681	53,61

Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara
mempunyai kewenangan
mencakup semua kewenangan
pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang



politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi Negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu:

1. Seketariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Ketahanan Pangan



14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informasi
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip
23. Dinas Perikanan
24. Dinas Pertanian
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Rumah Sakit Umum Daerah
32. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
33. Kecamatan Penajam
34. Kecamatan Waru
35. Kecamatan Babulu
36. Kecamatan Sepaku

C

Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai. Satu di antara tiga kebijakan pemerintah provinsi dan juga kebijakan utama yang akan diterapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas masyarakat yang sebelum berlangsungnya otonomi



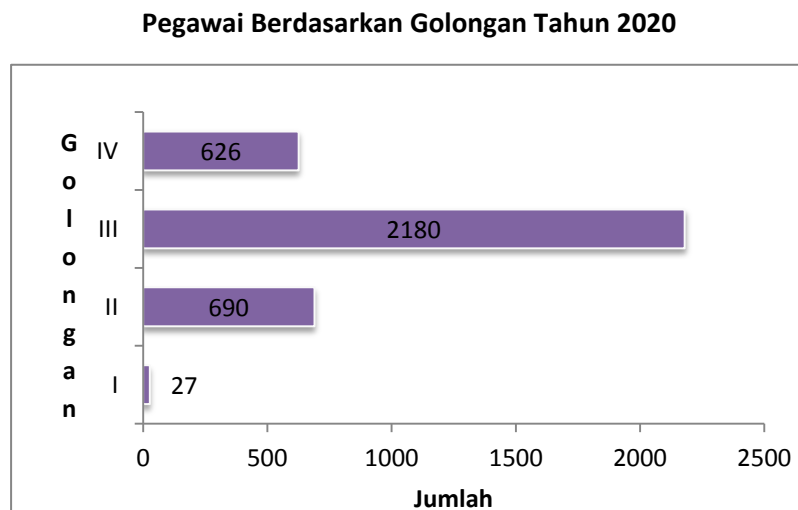
daerah, masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang tak ternilai harganya dan sangat berperan dalam kelangsungan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya di masa yang akan datang.

Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2020 berjumlah 3.523 Pegawai Negeri Sipil dengan gambaran komposisi aparatur menurut jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan



b. Berdasarkan Golongan



Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, berikut identifikasi isu strategis secara internal yang ada dan dapat dikelola oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu ini harus mendapat perhatian untuk dikelola pada RPJMD yang akan datang sehingga tujuan pembangunan, visi dan misi yang dicanangkan oleh Bupati dapat dicapai dengan baik.

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Penajam Paser Utara 2015 - 2025

Dalam RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2015, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 adalah : **Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui delapan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Mewujudkan revitalitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penajam Paser Utara dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur, oleh karenanya untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi pertanian akan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan dukungan kebijakan pemerintah akan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

2) Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.

Posisi Penajam Paser Utara yang berhadapan dengan Balikpapan dapat dikatakan sebagai pintu masuk arah Samarinda menuju Banjarmasin sehingga memiliki nilai strategis. Sarana pelayanan publik merupakan modal dasar pembangunan di suatu pemerintahan daerah dan tersedianya infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi, informasi dan energi.

3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

Mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik, yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang bertanggungjawab dan berwibawa dalam suasana politik dan hukum yang kondusif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

4) Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Agrobisnis merupakan suatu kegiatan integratif dari hulu hingga pemasaran yaitu subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir dan subsistem pemasaran. Potensi yang ada dan potensial untuk dikembangkan dalam sistem agrobisnis saat ini adalah subsistem budidaya dan subsistem pemasaran.

5) Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri.

Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) merupakan titik berat pembangunan agrobisnis dan agroindustri dimana secara umum UMKM merupakan penopang ekonomi nasional dan mampu



menyerap tenaga kerja. Dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKMK dan UMKMK yang partisipatif yang ditunjukkan dengan profil UMKMK yang transparan dan akuntabel akan melahirkan sinergi pembangunan ekonomi kerakyatan.

6) Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan harus dicegah baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

7) Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik.

Masyarakat yang maju dan berakhlak baik diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program-program yang berkesinambungan di bidang peningkatan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan agama serta pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan.

8) Mewujudkan jaringan intrastruktur transportasi dan prasarana utility yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Termasuk didalamnya tersedianya pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu tersediannya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri serta sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktifitas sektor-sektor ekonomi.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan dasar. Untuk urusan Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar



yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Pemerintah Penajam Paser Utara telah memiliki dokumen SPM yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi daerah.

3. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan daya saing. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem informasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem informasi.

Sejalan dengan isu internasional, nasional, regional maupun lokal, serta memperhatikan permasalahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya dalam kurun waktu 2019 – 2023, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan;
2. Pemenuhan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan jangkauan aksesibilitas layanan infrastruktur;
5. Penyediaan utilitas permukiman seperti air bersih, drainase, persampahan maupun air limbah;
6. Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
7. Peningkatan perekonomian dengan memperhatikan potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat serta lembaga-lembaga ekonomi setempat;



8. Pengembangan industri khususnya sektor sekunder dan tersier yang berdasarkan peningkatan nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
9. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dengan didukung pengembangan teknologi informasi;
10. Optimalisasi peningkatan PAD dengan memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian berkeadilan;
11. Penciptaan iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi;
12. Penguatan UKM dan Koperasi secara menyeluruh;
13. Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka perwujudan *good governance*.

Secara umum permasalahan di Kabupaten Penajam Paser Utara diuraikan dalam permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Urusan Pemerintah Wajib

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- ✚ Penempatan tenaga pendidik (guru) belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- ✚ Minimnya fasilitas perpustakaan dan laboratorium.
- ✚ Partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas masih rendah.
- ✚ Kurangnya jumlah dan kualitas Sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pemuda dan olahraga yang layak.

2. Kesehatan

- ✚ Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- ✚ Kurangnya ketersediaan dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan beserta sarana prasarana pendukung.
- ✚ Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- ✚ Kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok masyarakat masih belum optimal.



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

- ✚ Kualitas jalan terbangun masih rendah (jenis permukaan jalan masih didominasi untuk tanah timbunan dan agregat).
- ✚ Belum meratanya Penerangan Jalan Umum (PJU).
- ✚ Belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan.
- ✚ Rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi.
- ✚ Belum tersedianya data dasar daerah irigasi beserta jaringannya yang berbasis teknologi informasi.
- ✚ Belum seimbang upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- ✚ Belum terlaksananya peraturan tentang sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu.
- ✚ Masih minimnya kesiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
- ✚ Perda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodir dinamika pembangunan.
- ✚ Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- ✚ Belum ditetapkannya peraturan turunan perda RTRW guna mendukung rencana pengembangan wilayah dan dinamika pembangunan.
- ✚ Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

- ✚ Masih banyaknya rumah penduduk yang belum layak huni.
- ✚ Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- ✚ Persentasi kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan kategori baik belum mencapai 100%.



- ✚ Masih banyak bidang tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.
- ✚ Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi.
- ✚ Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- ✚ Kondisi geografis Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cakupan wilayah yang cukup luas merupakan kendala bagi Satuan Pamong Praja untuk melakukan pemantauan secara maksimal.
- ✚ Masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- ✚ Infrastruktur penanganan bencana belum memadai.
- ✚ Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih belum tersentral pada ibukota Kabupaten.
- ✚ Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih.
- ✚ Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mematuhi peraturan.
- ✚ Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban belum memadai.

6. Sosial

- ✚ Belum tersediannya *database* permasalahan sosial yang komprehensif dan terkini.
- ✚ Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan masih belum maksimal.
- ✚ Cakupan pelayanan program kesejahteraan social yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi pada berbagai sektor.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- ✚ Tingkat Pengangguran masih relatif tinggi.
- ✚ Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- ✚ Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.



- ✚ Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum berperan secara maksimal.
- ✚ Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan.

3. Pangan

- ✚ Tingginya ketergantungan penduduk pada bahan pangan beras.
- ✚ Pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan belum terbentuk sepenuhnya.

4. Lingkungan Hidup

- ✚ Peran serta masyarakat dan sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- ✚ Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan.
- ✚ Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan air limbah.

5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- ✚ Data kependudukan belum akurat dan mutakhir.
- ✚ Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum menyeluruh.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- ✚ Kurang optimalnya pendampingan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok usaha ekonomi pedesaan.
- ✚ Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal.
- ✚ Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- ✚ Terdapatnya beberapa wilayah kelurahan yang berdasarkan kriteria pemekaran wilayah perlu diubah menjadi desa.
- ✚ Teknologi tepat guna belum dimanfaatkan secara optimal.
- ✚ Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami regulasi.

7. Perhubungan

- ✚ Minimnya sarana, prasarana dan fasilitas pendukung perhubungan.



- ✚ Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat.
- ✚ Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dll).

8. Komunikasi dan Informatika

- ✚ Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal.
- ✚ *E-government* belum diimplementasikan secara optimal.
- ✚ Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai.

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- ✚ Belum adanya penilaian kesehatan bagi koperasi maupun usaha kecil dan menengah.
- ✚ Belum adanya kerjasama antara koperasi, UKM dan lembaga keuangan (Perbankan).
- ✚ Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola dan kesadaran anggota koperasi.
- ✚ Minimnya pendampingan yang bersifat menyeluruh/terintegrasi bagi UMKM, mulai dari sisi kualitas SDM pelaku UMKM, akses terhadap sumber daya produktif, permasalahan infrastruktur, pemasaran hingga kualitas dan kuantitas SDM aparatur dalam pembinaan dan pendampingan UMKM.
- ✚ Inovasi dan penerapan teknologi masih tergolong rendah.
- ✚ Rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan koperasi.

10. Penanaman Modal

- ✚ Kurangnya data potensi unggulan daerah.
- ✚ Data potensi penanaman modal belum memadai.
- ✚ Dibutuhkan dukungan infrastruktur dan regulasi.
- ✚ Lemahnya koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral antar Perangkat Daerah

11. Kebudayaan dan Pariwisata.

- ✚ Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dari luar daerah dan dunia internasional.



- + Kurangnya promosi objek wisata.
- + Destinasi pariwisata belum dikembangkan secara optimal.
- + Masih kurangnya sarana dan prasana penyelenggaraan seni dan budaya daerah.
- + Keterbatasan aksesibilitas dalam menjangkau obyek wisata.
- + Peran serta masyarakat masih cukup rendah dalam pengembangan obyek wisata setempat.

12. Perpustakaan

- + Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk kantor belum memadai.
- + Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif
- + Rendahnya minat baca masyarakat.
- + Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.
- + Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran masyarakat.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

- + Peningkatan produksi perikanan belum diikuti dengan penggunaan sarana tangkap yang ramah lingkungan.
- + Sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan masih terbatas.
- + Keterbatasan tenaga penyuluh.
- + Masih rendahnya nilai tambah pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

2. Pertanian

- + Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.
- + Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air pada lahan pertanian.
- + Produktivitas peternakan masih belum optimal.
- + Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah dari pengolahan hasil peternakan masih sangat rendah.



3. Ketahanan Pangan

- ✚ Ketergantungan terhadap konsumsi pangan beras lebih tinggi daripada jenis pangan karbohidrat lainnya.
- ✚ Rendahnya ketahanan pangan terutama masyarakat miskin.

3. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Pengawasan

- ✚ Kurangnya dukungan sumber daya manusia (SDM) aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- ✚ Masih rendahnya penerapan pengendalian internal pemerintah pada tiap Perangkat Daerah.

2. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- ✚ Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dokumen perencanaan belum optimal.
- ✚ Proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi belum terlaksana dengan baik.
- ✚ Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
- ✚ Proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis belum terwujud dan tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

3. Keuangan

- ✚ Pengelolaan aset daerah masih belum optimal.
- ✚ Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu memberikan kontribusi yang memadai terhadap Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian

- ✚ Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) masih relatif rendah.
- ✚ Distribusi dan jumlah ASN belum seimbang dengan beban kerja.



- ✚ Masih terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- ✚ Masih terbatasnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
- ✚ Jumlah jabatan fungsional masih sangat terbatas.

5. Pemerintahan Umum

- ✚ Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal.
- ✚ Perlunya ditingkatkan kerjasama dengan daerah lain dan pihak swasta, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang dalam jangka pendek dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- ✚ Belum optimalnya sistem pengawasan internal pada masing-masing perangkat daerah.

4. Daya Saing

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi daya saing daerah yang cukup tinggi karena memiliki keberadaan sumber daya alam (*natural resources*) melimpah seperti mineral & batubara, minyak bumi & gas, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Dengan ditunjang oleh posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografi yang berada pada jalur lintas transportasi Kalimantan, dimana menjadi jalur penghubung antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, juga berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, sebagai kota yang berdimensi Jasa dan Industri serta sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dengan keunggulan infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara dan laut serta dibidang informasi dan teknologi, yang pada akhirnya semakin memperkuat daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal aksesibilitas informasi dan transportasi. Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dicermati dari kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini sendiri dapat dianalisa dari empat (4) aspek penting. Aspek yang pertama adalah kemampuan ekonomi daerah, aspek ke dua infrastruktur, aspek ke tiga iklim investasi dan aspek ke empat sumber daya manusia.



4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Penajam Paser Utara menunjukkan tanda semakin membaik, terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif.

Nilai PDRB PPU (ADHB) selama periode 2013-2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2013, PDRB PPU (ADHB) sebesar Rp 6,98 triliun dan mencapai Rp 8,45 triliun pada tahun 2017.

4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

4.2.1 Perhubungan

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi darat dan memiliki peran penting dalam mobilitas antar 54 desa/kelurahan, 4 kecamatan, antar 3 Kabupaten serta Kota bahkan lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Sistem transportasi Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik yang cukup kompleks dengan baik melalui darat maupun laut/perairan.

Untuk transportasi udara, saat ini sistem angkutan dan pergerakannya mengikuti pengembangan sarana prasarana yang ada di Kota Balikpapan.

Untuk transportasi darat, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun jalan sepanjang 1.240,96 km. Rel Kereta Api direncanakan akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat 2 jalur kereta api yakni pertama yang dibangun pihak swasta yaitu kereta api borneo (dibangun oleh Russian railways), yang kedua dibangun oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perkeretapihan. Kereta api yang digunakan untuk barang dan penumpang. Untuk jalur kereta



api borneo melalui kawasan industri Buluminung menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Sedangkan jalur kereta api yang dibangun oleh kementerian perhubungan dari Kabupaten Kutai Timur, melalui Penajam menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

Sedangkan transportasi air, Pembangunan jembatan Pulau Balang, rencana pembangunan jembatan Nipah-Nipah – Melawai merupakan salah satu cara menghubungkan antar wilayah yang dipisahkan oleh teluk. Saat ini transportasi laut menuju dari dan ke Kota Balikpapan dilakukan dengan menaiki Fery, Speed boat dan perahu kelotok.

4.2.2 Penataan Ruang

Berdasarkan identifikasi kondisi lahan yang ada, Penajam Paser Utara memiliki kawasan produktif yang masih sangat luas untuk dikembangkan. Dari luas kawasan budidaya yang meliputi 288.623 Ha, baru 12,03% yang dimanfaatkan (Pola ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030). Luas wilayah industri berdasarkan Pola Ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030 adalah seluas 842 Ha, sedangkan luas budi daya adalah seluas 288.621 ha. Kawasan gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas \pm 8.400 Ha. Luas lahan kering tanaman pangan yang terdapat dalam pola ruang RTRW sebesar 22.285 Ha. Sedangkan, luas wilayah perkotaan berdasarkan pola ruang RTRW adalah seluas 7.359 Ha.

4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka menarik minat investasi, Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perbaikan, pembenahan sarana dan prasarana baik berupa penyiapan kawasan seperti penetapan kawasan industri buluminung maupun kelengkapan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur serta kebijakan.

Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan jenis permukaan Tahun 2018, bahwa total jalan yang masuk kondisi mantap



sebesar 43 persen lebih. ketersediaan bendung Lawe-Lawe yang diharapkan rampung tahun ini, mampu menyuplai kebutuhan air bersih wilayah penajam dan sekitarnya serta menyuplai kawasan industri Buluminung kedepannya. Surplus energi listrik melalui sambungan barito dan sambungan Mahakam diharapkan mampu menarik investor masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan kondusif. Dimana tidak pernah terjadi konflik horizontal selama Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk mulai Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2018.

Terkait kebijakan pelayanan publik secara prima, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meluncurkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) pada tahun 2015. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik terus diciptakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

4.4.1 Rasio Tingkat Pendidikan Penduduk

Berdasarkan data pada tahun 2017, jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 1.934 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 157.711, sehingga diperoleh Rasio Lulusan sebesar 254,64 atau dapat diartikan bahwa pada setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 122 orang yang berpendidikan S1/S2/S3.

4.4.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau sedang berkembang.



Demografi Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun 2018 mengalami penurunan nilai Rasio yang artinya mengalami pengurangan beban penduduk yang ditanggung. Pada tahun 2018, dengan nilai Rasio Ketergantungan sebesar 41,3 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang (dianggap belum dan tidak produktif).

4.4.2 Rencana Pengembangan Kawasan

Rencana pengembangan kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu 2014 - 2018 diarahkan kepada pengembangan wilayah pesisir, namun juga tidak mengesampingkan pengembangan pada wilayah-wilayah lainnya.

Konsep pengembangan wilayah yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dijabarkan kedalam 4 Zona yaitu :

1. **Zona SATU** adalah wilayah sepanjang jalur teluk Balikpapan yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku yaitu sepanjang Mentawir, Semoi-Sepaku dan wilayah Maridan (ITCI). Kawasan ini merupakan wilayah yang dikhususkan untuk perkembangan kegiatan industri perkayuan, perkebunan kelapa sawit (beserta produk turunannya), peternakan, dan sebagian berfungsi sebagai pelabuhan batubara, secara fungsi merupakan masuk zona *“working waterfront”*.
2. **Zona KEDUA** adalah zona Industri, pelabuhan dan penelitian meliputi wilayah sepanjang teluk Balikpapan yang berada di wilayah Kelurahan Buluminung, Gersik, Jenebora, Pantai Lango dan sekitarnya. Akses penghubung yang digunakan adalah Jembatan Pulau Balang. Investasi yang telah masuk antara lain adalah pelabuhan CPO Astra, Supply Base Eiscal, Pelabuhan Pemda, Pelabuhan atau Terminal Khusus Batubara PT. PenajamPrima Coal, PT. BMS, PT. Cipaganti Resources dan Perusda BenuoTaka. Investasi yang akan masuk antara lain : Pabrik Ethanol, Smelter Nikel, dan Pusat Penelitian Kelautan BPPT.



3. **Zona KETIGA** adalah gabungan antara:

- a) *Mixed Used Waterfront* adalah *waterfront* yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, pendidikan dan/atau tempat-tempat kebudayaan.
 - b) *Recreational Waterfront* adalah adalah semua kawasan *waterfront* yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
 - c) *Residential Waterfront* adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan. Lokasinya adalah sepanjang jalur *coastal road* yang berada di wilayah Nipah nipah, Sungai Parit, hingga wilayah pelabuhan penyeberangan ferry. Bahkan dalam perencanaan ke depan akan diperluas hingga ke Pantai Tanjung Jumalai. Penghubung yang direncanakan adalah Jembatan PPU – Balikpapan, Jalur Nipah nipah – Melawai, menghubungkan dua *Coastal Road* antar dua wilayah.
4. **Zona EMPAT** adalah zona yang meliputi wilayah pesisir pantai yang langsung menghadap dengan Selat Makassar, wilayah tersebut meliputi Kecamatan Babulu dan Waru yang secara khusus akan menjadi pengembangan sektor budidaya perikanan dan sejenisnya, termasuk juga akan dikembangkan sebagai sentral pertanian yang diharapkan akan jadi lumbung pangan bagi Kalimantan Timur.

E

Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2020 berdasarkan perjanjian kinerja dan perbandingan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta capaian terhadap kondisi akhir RPJMD sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah, dimana tahun 2020 ini merupakan tahun kedua RPJMD 2018-2023.



Laporan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dibelanjakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1). Rencana Kinerja Tahun 2020
- 2). Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- 3). Pengukuran Kinerja Tahun 2020
- 4). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran serta bagaimana cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen resmi sudah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2020 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2020. Rencana Kinerja dalam Tahun 2020 berbentuk dokumen resmi yang disusun di awal Tahun 2020, yang merupakan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

A Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan mandat, serta dengan melihat latar belakang dan mencermati isu-isu strategis yang berkembang, maka visi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Maju, Modern, dan Religius”

Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain :

1. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **maju**
Meningkatnya kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan system dan kelembagaan politik dan hukum.
2. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **modern**
Mampu dan setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **religius**

Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar, sederajat dan seimbang dunia dan akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai serta hidup berdampingan antara sesama pemeluk agama dilandaskan Lakum dinnukum Waliyadin dan Pancasila.

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam 11 (sebelas) misi, yakni:

- 1 *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran*
- 2 *Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu*
- 3 *Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan*
- 4 *Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.*
Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan
- 5 *Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan*
- 6 *Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman*
- 7 *Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.*
- 8 *Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.*
Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.
- 9 *Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.*
- 10
- 11



Tabel dibawah ini menyajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Misi	Tujuan	Sasaran
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran	1 Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Meningkatkan perekonomian masyarakat
	2 Pengurangan angka pengangguran	2 Mengurangi angka pengangguran
2 Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu	3 Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	3 Meningkatkan investasi di kawasan industri
3 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan	4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	4 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
		5 Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
		6 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4 Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas	5 Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	7 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
		8 Meningkatkan distribusi pangan
5 Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan	6 Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	9 Meningkatkan daya saing daerah
		10 Meningkatkan kerjasama perekonomian

Misi	Tujuan	Sasaran
6 Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan	7 Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	11 Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan
7 Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman	8 Memantapkan infrastruktur daerah	12 Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
	9 Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	13 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman
	10 Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	14 Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
8 Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas	11 Optimalisasi PAD	15 Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
9 Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	12 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	16 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
10 Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah	13 Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	17 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web



Misi	Tujuan	Sasaran
11 Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.	14 Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	18 Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
	15 Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	19 Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan

C

Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.

Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.



**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Misi 1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan ekonomi masyarakat dengan perluasan lapangan kerja	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian ekonomi
Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang bersaing global	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kecil menengah
			Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu Strategi	Pengembangan industri pengolahan produk lokal daerah
				Perluasan dan penyediaan lapangan kerja
				Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM
				Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial

Misi 2

Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	Meningkatkan investasi di kawasan industri	Nilai investasi	Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri Buluminung	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas daerah

Misi 3

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Peningkatan kualitas pendidikan	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Pembangunan ruang kelas belajar (RKB) beserta fasilitas pendukungnya
		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Peningkatan akses pendidikan usia dini (PAUD)
	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat propinsi dan Nasional		Peningkatan kualitas tenaga pengajar
				Peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	Peningkatan kualitas kesehatan	Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)		Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pengembangan lingkungan sehat
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Misi 4

Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Peningkatan produksi pangan	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan
	Meningkatkan distribusi pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan		Pemenuhan air baku irigasi
				Pengembangan teknologi dan mekanisasi pertanian
				Pengembangan kualitas petani

Misi 5

Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	Peningkatan produksi pertumbuhan ekonomi bidang agribisnis, agro industri, pariwisata, perdagangan dan jasa	Pengembangan produksi bidang agribisnis dan agro industri
		NTP		Penetapan dan pengembangan potensi wisata
		Peningkatan Jumlah WUB yang kompetitif		Peningkatan akses pariwisata beserta fasilitas pendukungnya
	Meningkatkan kerjasama perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani		Peningkatan kerjasama investasi

Misi 6

Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penanggulang an kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	Status Desa	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Peningkatan iklim investasi
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan		Peningkatan stimulan UMKM
		Persentase kemiskinan		Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan
				Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES

Misi 7

Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap	Peningkatan infrastruktur daerah dan pengelolaan lingkungan serta penataan ruang dan perumahan dan permukiman	Peningkatan infrastruktur dasar
		luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa (Ha)		
		Persentase pemukiman yang tertata		Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana
		Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Jumlah bangunan/gedung terbangun		Peningkatan pengelolaan lingkungan
		Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan		Penataan ruang daerah
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)		
		Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat		
Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana		Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak
		Rata-rata waktu respon kejadian bencana		
		Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana		
		Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana		
		Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan		



Misi 8**Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan PAD	Peningkatan pendapatan daerah	Optimalisasi pendapatan daerah
			Peningkatan potensi sumber-sumber PAD	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD

Misi 9**Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	Pelayanan publik yang prima dan penyederhanaan sistem birokrasi
				Penerapan standar, operasional dan pelaksanaan
				Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Misi 10**Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi komunikasi dan informatika	Penyediaan layanan internet pada kantor pemerintahan termasuk kelurahan dan desa
				Penyediaan hotspot pada tempat pelayanan publik
				Penyebarluasan informasi

Misi 11

Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat panajam paser utara yang maju, modern dan religius

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Kasus/konflik yang bernuansa agama	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban guna mendukung pelaksanaan beribadah 2. Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

D**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian ekonomi.	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
2	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kecil menengah.	2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha.
3	Pengembangan industri pengolahan produk lokal daerah.	3	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4	Perluasan dan penyediaan lapangan kerja.	4	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
5	Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial.	5	Peningkatan Kesempatan Kerja.

Misi 2: Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas daerah.	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		2	Program Penataan Struktur Industri.
		3	Program Penataan Kawasan Strategis.
		4	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar.
		5	Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Pembangunan ruang kelas belajar (RKB) beserta fasilitas pendukungnya. Peningkatan akses pendidikan usia dini (PAUD). Peningkatan kualitas tenaga pengajar. Peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa. Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Pengembangan lingkungan sehat. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini.
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
		3	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh.
		4	Program Pendidikan Non Formal.
		5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
		6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
		7	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
		8	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan.
		9	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
		10	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
		11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
		12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
		13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
		14	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
		15	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
		16	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
		17	Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olahraga.
		18	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
		19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
		20	Program Keluarga Berencana.
		21	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
		22	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
		23	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat.
		24	Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas luas

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1 Peningkatan produktifitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. 2 Pemenuhan air baku irigasi. 3 Pengembangan teknologi dan mekanisasi pertanian. 4 Pengembangan kualitas petani.		1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
		2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
		3	Program Peningkatan Produksi.
		4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
		5	Program Pembangunan Usaha Perkebunan.
		6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
		7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
		8	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
		9	Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
		10	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
		11	Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
		12	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.
		13	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		14	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan.
		15	Program Pembangunan Taman Laut Penajam.
		16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

Misi 5: Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Sasaran		Program Pembangunan	
1 Pengembangan produksi bidang agribisnis dan agro industri. 2 Penetapan dan pengembangan potensi wisata. 3 Peningkatan akses pariwisata beserta fasilitas pendukungnya 4 Peningkatan kerjasama investasi.		1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
		3	Program Pengembangan kemitraan pariwisata.
		4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
		5	Program Pengembangan Nilai Budaya.
		6	Program peningkatan kesejahteraan petani.
		7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
		8	Program Produksi Hasi Peternakan.
		9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/ Peternakan Lapangan.
		10	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
		11	Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan.
		12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
		13	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.



Sasaran		Program Pembangunan	
		14	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
		15	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
		16	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah.
		17	Program Pengembangan Logistik Hasil Perikanan.
		18	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
		19	Program Pengembangan Pengolahan, Diverifikasi Usaha dan Bina Mutu Produk.
		20	Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

Misi 6: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan

Sasaran		Program Pembangunan	
1 Peningkatan iklim investasi. 2 Peningkatan stimulan UMKM. 3 Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan. 4 Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES.		1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.
		2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
		4	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial.
		5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
		6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
		7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
		8	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
		9	Program Pro-PPK-PPU.
		10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
		11	Program Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan.
		12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

Misi 7: Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman

Sasaran		Program Pembangunan	
1 Peningkatan infrastruktur dasar. 2 Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana. 3 Peningkatan pengelolaan lingkungan. 4 Penataan ruang daerah. 5 Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak.		1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		2	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
		3	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
		4	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
		5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		6	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		7	Program pengendalian banjir



Sasaran		Program Pembangunan	
		8	Program penyediaan dan pengolahan air baku
		9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		10	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		11	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		12	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		13	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		14	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
		15	Program pengelolaan areal pemakaman
		16	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
		17	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		18	Program Pengembangan Perumahan
		19	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
		20	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		21	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		22	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		23	Program peningkatan pelayanan angkutan
		24	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
		25	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		26	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air
		27	Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan
		28	Program Pembangunan Kawasan mangrove sebagai pusat restorasi
		29	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		30	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		31	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		32	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		33	Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah
		34	Program perencanaan dan pengembangan Hutan
		35	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		36	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		37	Program Perencanaan Tata Ruang
		38	Program Pemanfaatan Ruang
		39	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah



Sasaran		Program Pembangunan	
		40	Program Pengendalain Pemanfaatan Ruang
		41	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (peningkatan kasus tanah yang terselesaikan)
		42	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		43	Program Penataan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		44	Pogram Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (terselesaikannya konflik-konflik pertanahan)
		45	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		46	Program Penanggulangan Kebakaran
		47	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan
		48	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
		49	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		50	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana
		51	Program Pengendalian Penanganan Bencana
		52	Program Rekonstruksi Infrastruktur Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana
		53	Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
		54	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
		55	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
		56	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Misi 8: Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Optimalisasi pendapatan daerah Intensiikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD.	1	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Misi 9: Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Pelayanan publik yang prima dan penyederhanaan sistem birokrasi.	1	Program Pengembangan Data/Informasi.
		2	Program Penataan Administrasi kependudukan.
		3	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
2	Penerapan standar, operasional dan pelaksanaan.	4	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
		5	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.



Sasaran		Program Pembangunan	
3	Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.	6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
		7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
		8	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
		9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
		10	Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
		11	Program Kerjasama Pembangunan.
		12	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
		13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
		14	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian.
		15	Program Penanganan Bidang hukum.
		16	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
		17	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Misi 10: Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Penyediaan layanan internet pada kantor pemerintahan termasuk kelurahan dan desa.	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
		2	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
		3	Program Sistem Data Gender dan Anak.
		4	Program Keluarga Berencana.
2	Penyediaan hotspot pada tempat pelayanan publik.	5	Program sistem PBDKI (Basis Data Keluarga Indonesia).
		6	Program sistem Pelaporan SR F/I/DALL dan F/ II/ KB.
3	Penyebarluasan informasi.	7	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
		8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
		9	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Misi 11: Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Peningkatan keamanan dan ketertiban guna mendukung pelaksanaan beribadah.	1	Program Pembinaan Keagamaan
		2	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba
		3	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
		4	Program ketahanan sosial dan ekonomi
2	Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat.	5	Program pendidikan politik masyarakat
		6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		7	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak criminal
		8	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan



Di Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan 19 (sembilan belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang akan dicapai dengan memanfaatkan Anggaran Belanja dan Pendapatan (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang akan dicapai di tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13 ± 1	%
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,85	%
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	57.415.400.000	Rupiah
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	14,86	Tahun
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,7	Tahun
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,50	Tahun
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai <i>Event</i> Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2	Medali
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	69,38	%
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	635	Skor
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	11,50	%
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87,64	Skor
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	75.944	Orang
		NTP	103	Indeks
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	130	WUB
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	450	Perizinan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 6 Berkembang = 24 Tertinggal= 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa	%
			82	
		Persentase kemiskinan	7,36	%
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	163,71	Km
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	37,035	Ha
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99,75	%
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	200	SPAM
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3	Unit
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9	Kejadian
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,50	Indeks
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	90,55	%
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	20	Ha
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	70	%
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 24	Jam
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	76	%
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	120	Ha
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	180.567.469.806	Rupiah
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKJIP)	B	
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	43	Aplikasi
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0	Kasus
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	86	%



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban tugas dan amanah masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020.

Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta beberapa langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

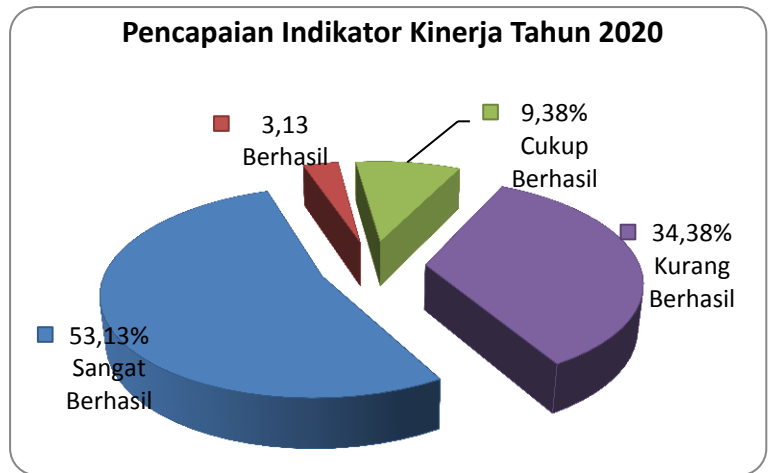
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$x > 85$	Sangat Berhasil
$75 < x \leq 85$	Berhasil
$55 < x \leq 75$	Cukup Berhasil
$x \leq 55$	Kurang Berhasil

A *Capaian Kinerja Organisasi*

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban amanah masyarakat, secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 sebanyak 19 sasaran dengan 36 indikator kinerja. Dari 36 indikator kinerja, sebanyak 17 indikator atau 53,13% dalam kriteria **Sangat Berhasil**, 1 indikator atau 3,13% dalam kriteria **Berhasil**, 3



indikator kinerja atau 9,38% masuk dalam kriteria **Cukup Berhasil**, dan 11 indikator kinerja atau 34,38% masuk dalam kriteria **Kurang Berhasil**, serta 4 indikator kinerja tidak dapat ditampilkan hasil capaiannya.

Selengkapnya capaian indikator kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,13 ± 1 %	-2,34	-74,76
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,85 %	6,22	45,82
3	Nilai investasi	57.415.400.000 Rupiah	571.576.200.000	995,51
4	Rata-rata lama sekolah	14,86 Tahun	8,28	55,72
5	Harapan Lama Sekolah	10,7 Tahun	12,56	117,38
6	Angka Harapan Hidup	71,50 Tahun	71,41	99,87
7	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan Nasional	2 Medali	-	-
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,38 %	50,02	72,10
9	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	635 Skor	-	-
10	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	11,50 %	21,96	190,96
11	Pencapaian skor pola pangan harapan	87,64 Skor	91,00	103,83
12	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	75.944 Orang	14.371	18,92
13	NTP	103 Indeks	-	-
14	Peningkatan Jumlah WUB yang kompetitif	130 WUB	60	46,15
15	Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani	450 Perizinan	937	208,22



No	Indikator Kinerja	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
16	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 6 Berkembang = 24 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa Mandiri = 3 Maju = 9 Berkembang = 18 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 300% Maju = 150% Berkembang = 75% Tertinggal = 100% Sangat Tertinggal = 100%
				145
17	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa	Kelurahan, Desa	16,63
		80	%	20,28
18	Persentase kemiskinan	7,36	%	7,36
19	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	163,71	Km	23,15
20	Luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa	37,035	Ha	28,57
21	Persentase pemukiman yang tertata	99,75	%	99,72
22	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola masyarakat	200	SPAM	8
23	Jumlah bangunan/ gedung terbangun	3	Unit	0
24	Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan	9	Kejadian	31
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,50	Indeks	70,09
26	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	90,55	%	92,96
27	Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	20	Ha	13
28	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	70	%	63,59
29	Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 24	Jam	< 6
30	Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	76	%	30,89
31	Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	120	Ha	185,24
32	Peningkatan PAD	180.567.469.806	Rupiah	88.250.948.814,26
33	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B		-
34	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	43	Aplikasi	48
35	Kasus/ konflik yang bernuansa agama	0	Kasus	0
36	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	86	%	76
				88,37



SASARAN 1

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,61 %	3,13±1	-2,34	-74,76	3,13±1	-74,76
Rata-rata Capaian Kinerja					-74,76		-74,76

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Struktur PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti, masih relatif sama dengan struktur pada tahun-tahun sebelumnya. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Penajam Paser Utara yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 25,83 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 21,96 persen; Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 16,46 persen; Lapangan Usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 11,84 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 9,41 persen.

Jika diamati berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi, lapangan usaha yang memiliki andil positif yaitu Lapangan Usaha Konstruksi dengan andil sebesar 0,28 persen; diikuti Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi dengan andil sebesar 0,16 persen; Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil sebesar 0,11 persen; dan 0,17 persen merupakan andil dari enam lapangan usaha yang lainnya.

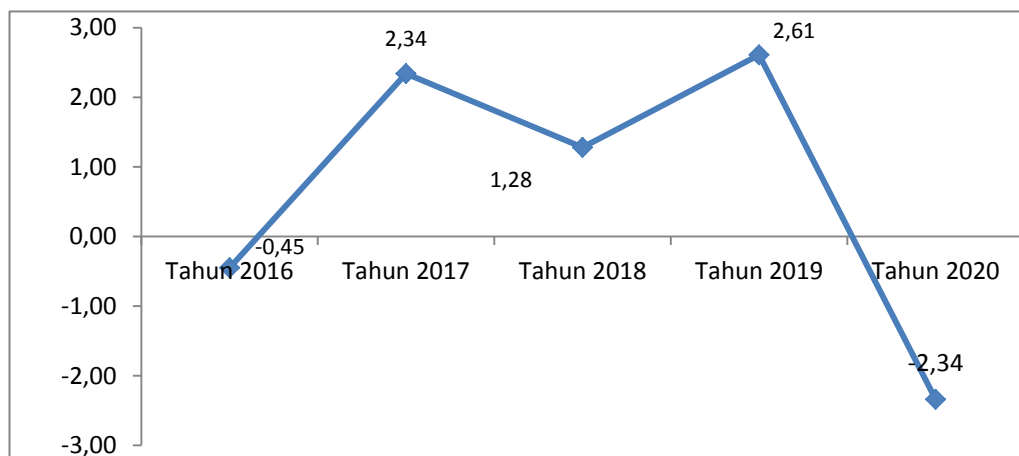
Sedangkan tiga lapangan usaha dominan yang berperan tinggi dalam perekonomian Penajam Paser Utara memberikan andil negatif yang cukup besar. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan masih memberi andil negatif sebesar 1,42 persen; Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan andil negatif sebesar 1 persen; dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan



Perikanan dengan andil negatif sebesar 0,33 persen. Kondisi ini memperlambat kecepatan laju pertumbuhan ekonomi Penajam Paser Utara Tahun 2020.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan pergerakan masyarakat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 - 2020



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, yaitu :

1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi



SASARAN 2

Pengurangan Angka Pengangguran

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,08 %	2,85	6,22	45,82	2,75	68,07
Rata-rata Capaian Kinerja					45,82		68,07

Tingkat Pengangguran Terbuka

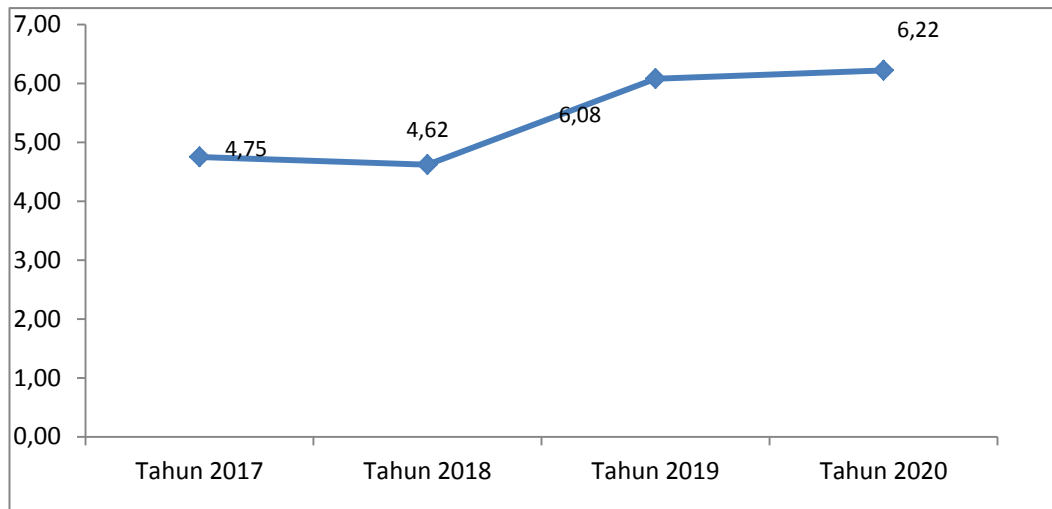
Pengangguran dapat disebabkan oleh minimnya kualitas, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan kelompok angkatan kerja, serta masalah ketenagakerjaan yang dapat memicu pengangguran. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pada tahun 2020, bila ditinjau dari kegiatan utama penduduk berusia 15 tahun ke atas maka Angkatan Kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara Sebesar 82.006 penduduk dan bukan angkatan kerja berjumlah 36.778, dari jumlah ini, diperoleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 sebesar 69.04 persen dan TPT Penajam Paser Utara adalah sebesar 6,22 persen.

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 sebanyak 1.185 orang ditempatkan sebanyak 275 orang dan belum ditempatkan sebanyak 910 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 - 2020



Pendidikan dan Pelatihan untuk tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.

Dalam rangka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

- a. Mengadakan pelatihan-pelatihan;
 - Pelatihan juru ukur/ surveyor di BLK Samarinda
 - Pelatihan tour leader di BLK Medan
- b. Menyebarluaskan informasi bursa tenaga kerja
- c. Sosialisasi penempatan tenaga kerja lokal



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Pengurangan Angka Pengangguran”, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja.



SASARAN 3

Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Investasi	1.646.202.400.000 Rupiah	57.415.400.000	571.576.200.000	995,51	450.233.867.774	492,58
Rata-rata Capaian Kinerja					995,51		492,58

Nilai Investasi

Nilai Investasi Tahun 2018 - 2020

Tahun	Nilai Investasi		Jumlah Investasi (Rp)
	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	
Tahun 2018	13.884.277.863,57	315.473.800.000	329.358.077.864
Tahun 2019	66.963.000.000	1.007.135.600.000	1.074.098.600.000
Tahun 2020	84.528.000.000	487.048.200.000	571.576.200.000

Realisasi Investasi PMA pada tahun 2020 sebesar Rp 84.528.000.000,00,- , nilai ini menunjukkan meningkatnya pencapaian dibandingkan tahun 2019, yang sebesar Rp 66.963.000.000,00,- , Sedangkan untuk PMDN Tahun 2020 nilai investasi sebesar Rp 487.048.200.000,- nilai ini menunjukkan berkurangnya nilai investasi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 1.007.135.600.000,00,-. Berkurangnya pencapaian di tahun 2020 apabila dibandingkan tahun 2019 disebabkan oleh melemahnya perekonomian di Indonesia akibat wabah covid-19 yang berimbas pada penurunan nilai investasi.

Sampai dengan tahun 2020, Capaian Nilai Investasi PMA sebesar Rp 173.791.500.000 dan Nilai Investasi PMDN Rp 2.043.987.100.000 . Nilai ini telah melebihi target RPJMD.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- Adanya komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP untuk mencapai Target kinerja;

- b. Rencana kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan target kinerja;
- c. Berjalannya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri”, yaitu:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

SASARAN 4

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata lama sekolah	8,16 Tahun	14,86	8,28	55,72	15,07	54,94
2	Harapan Lama Sekolah	12,55 Tahun	10,7	12,56	117,38	10,96	114,60
3	Angka Harapan Hidup	71,30 Tahun	71,50	71,41	99,87	72,50	98,50
Rata-rata Capaian Kinerja					90,99		89,35

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama



sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

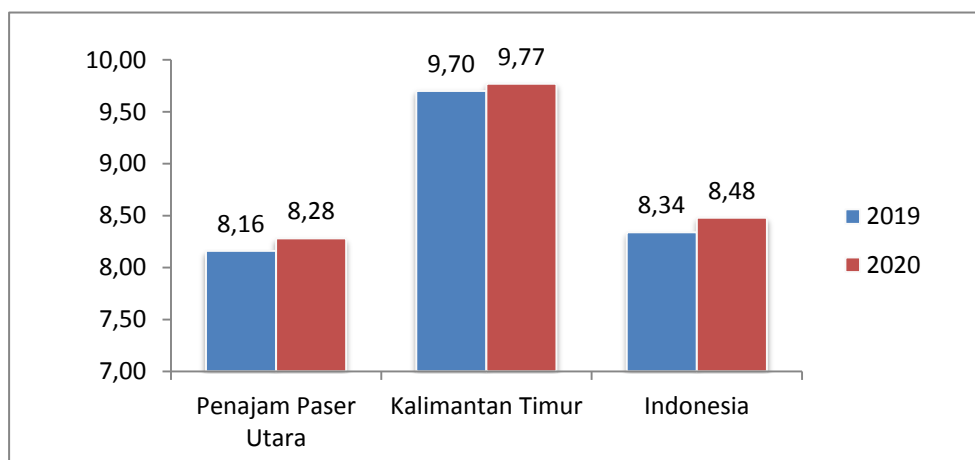
Pada Tahun 2020, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 8,28



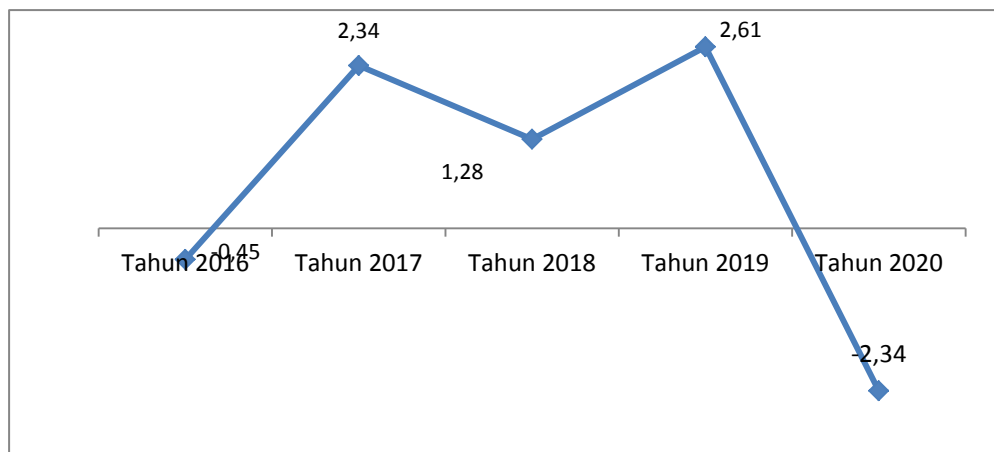
tahun masih kurang dari target yang diperjanjikan, dengan capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 55,72 persen. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih rendah dibandingkan dengan Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia dan Rata-Rata Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur, dilihat dari data BPS Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia tahun 2020 sebesar 8,48 tahun dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 9,77 tahun.

Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendorong meningkatnya Rata-rata Lama sekolah adalah antara lain dengan memberikan bantuan peralatan sekolah bagi siswa, bea siswa bagi siswa berprestasi, kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah negeri melalui program wajib belajar sembilan tahun untuk mendorong warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang berusia sekolah untuk bersekolah agar minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Rata-rata Lama Sekolah Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, Indonesia Tahun 2019 - 2020



Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016 - 2020



2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah didapatkan dengan menghitung rata-rata jumlah penduduk yang bersekolah pada rentang umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada rentang umur tertentu.

Pada tahun 2020, Angka Harapan Lama sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 12,56 tahun dari target



yang ditetapkan 10,7 tahun dengan capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 117,38 persen.

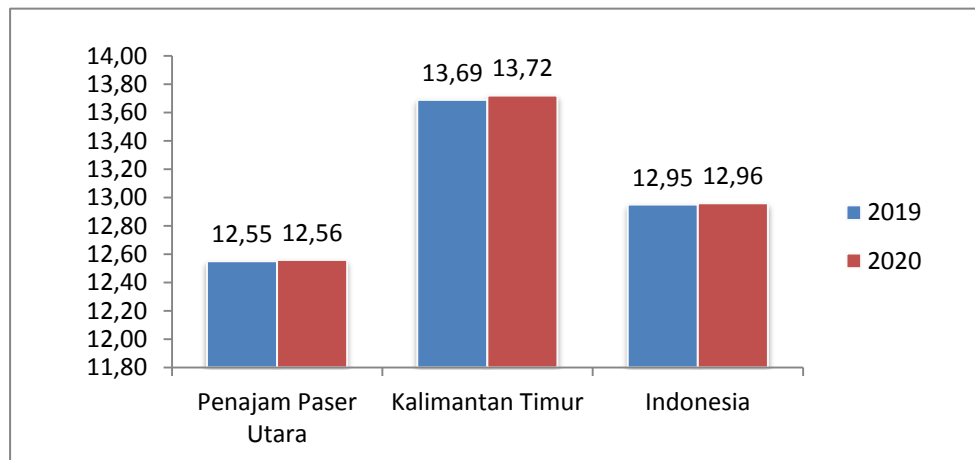
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia, dilihat dari data BPS Angka Harapan Lama sekolah di Indonesia tahun 2020 sebesar 12,96 tahun dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 13,72 tahun.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui sosialisasi pendidikan dari tingkat PAUD, memberikan bantuan peralatan pendukung sekolah bagi siswa, bea siswa

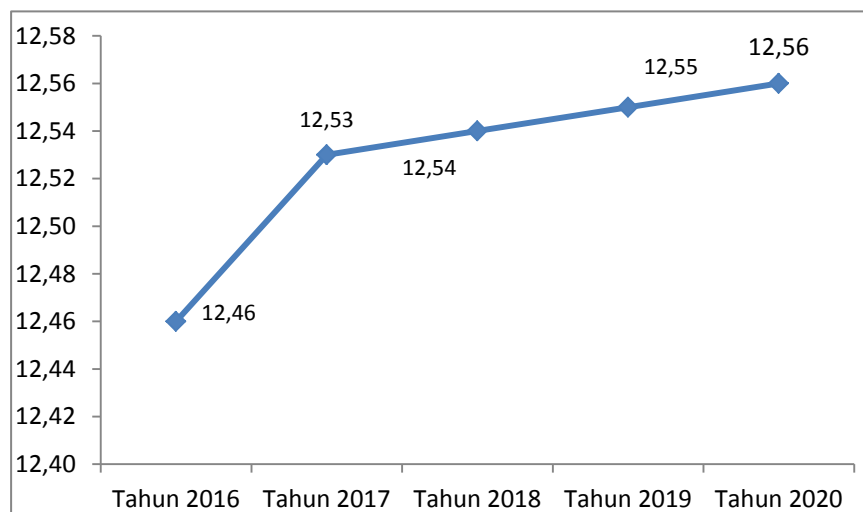


bagi siswa berprestasi, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP.

Harapan Lama Sekolah Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, Indonesia Tahun 2019 - 2020



Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 - 2020



3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang. AHH menjadi suatu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup yaitu : faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

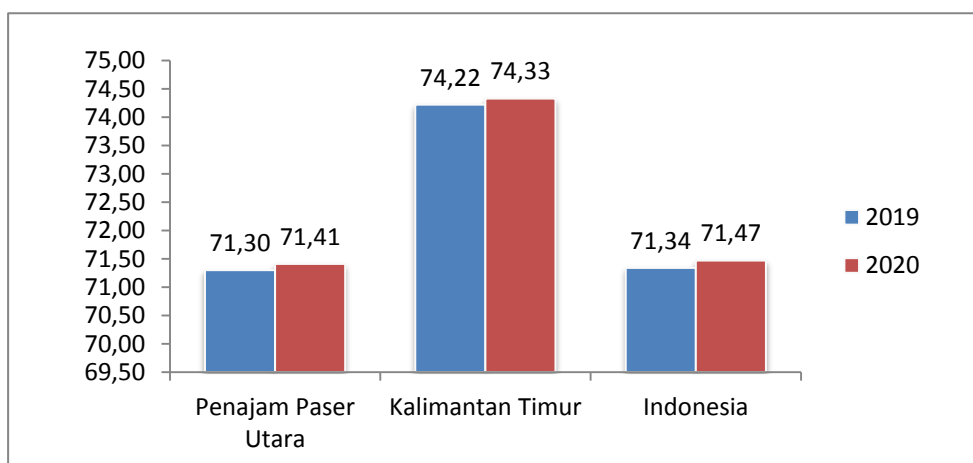


Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 sebesar 71,41 tahun, mengalami kenaikan 0,11 tahun dari tahun 2019. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu meningkat beberapa tahun terakhir.

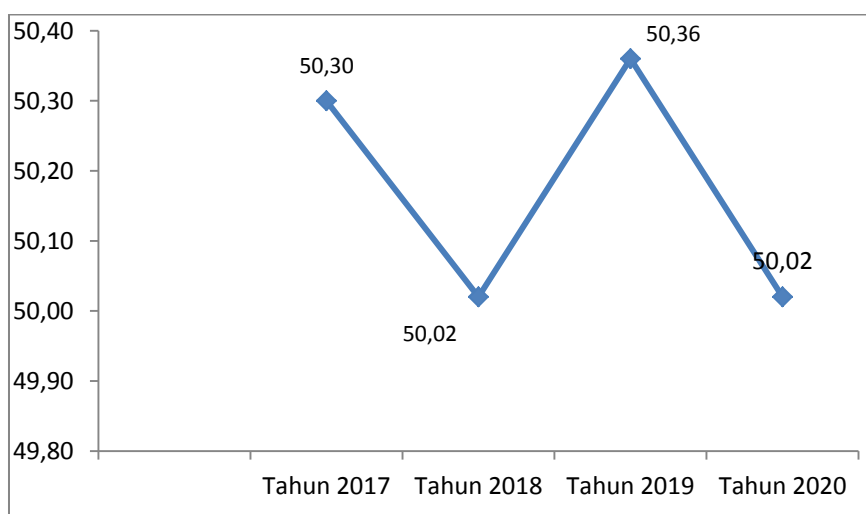
Pengukuran Angka Harapan Hidup ini bersumber dari data BPS tahun 2020. Dari target yang ditetapkan sebesar 71,50 tahun, Angka Harapan Hidup pada tahun 2020 sebesar 71,41 tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,87%.

Angka AHH ini masih berada di bawah capaian AHH di Provinsi Kalimantan Timur 74,33 tahun dan Indonesia sebesar 71,47 tahun, tingginya AHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional terutama dibidang kesehatan.

Angka Harapan Hidup Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, Indonesia Tahun 2019 - 2020



Angka Harapan Hidup Tahun 2017 - 2020



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan”, yaitu :

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

SASARAN 5

Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai <i>event</i> olahraga tingkat provinsi dan Nasional	2 Medali	2	-	-	3	0
Rata-rata Capaian Kinerja					-		-

Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai *Event* Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional

Pada tahun 2020, Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai *Event* Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional tidak dapat terealisasi sesuai yang ditargetkan karena tidak adanya *event* olahraga tingkat provinsi maupun tingkat nasional akibat adanya pandemi covid-19.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda”, yaitu :

1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

SASARAN 6

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

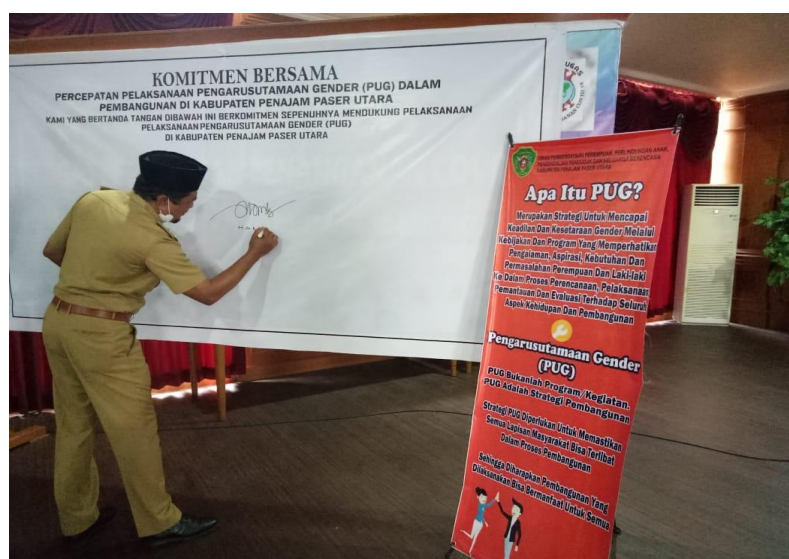
No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,36 %	69,38	50,02	72,10	79,70	62,76
2	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	545 Skor	635	-	-	660	-
Rata-rata Capaian Kinerja					72,10		62,76

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Variabel yang digunakan dalam pengukuran pemberdayaan gender (*gender empowerment*) adalah:

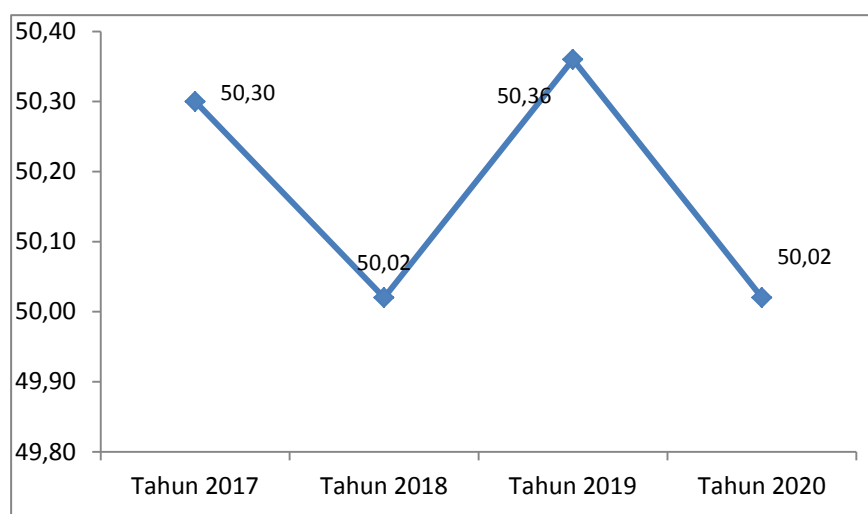
1. Peran perempuan di bidang pengambilan keputusan politik diukur dengan keanggotaan DPR dan DPRD.
2. Peran perempuan di bidang ekonomi diukur seberapa banyak perempuan yang bekerja sebagai pekerja profesional, kepemimpinan, teknisi dan ketatalaksanaan atau pekerja terampil.
3. Penguasaan sumber daya ekonomi yaitu perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki.

IDG Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2020 berada pada angka 50,02 persen. Angka ini belum mencapai target 69,38 persen yang diperjanjikan, dengan capaian kinerja sebesar 72,10 persen. Angka ini



menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 50,36 persen atau menurun 0,34 persen.

Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017 - 2020



2. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Kategori Penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak Berdasarkan Skor

No	Skor	Kategori
1	901- 1000	Kabupaten/ Kota Layak Anak
2	801 – 900	Utama
3	701 – 800	Nindya
4	601 – 700	Madya
5	501 - 600	Pratama

Pada Tahun 2019 Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) Kategori Pratama dengan point 545 tahun 2019, dan Tahun 2020 evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak dilaksanakan. Diharapkan dengan bertambahnya Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis



Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Penajam Paser Utara, kategori penghargaan kabupaten layak anak dapat meningkat.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, yaitu :

1. Program Sistem Data Gender dan Anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
3. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan
4. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
5. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak
6. Program Keluarga Berencana



SASARAN 7

Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019		2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	20,28	%	11,50	21,96	190,96	13	168,92
Rata-rata Capaian Kinerja						190,96		168,92

Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB suatu wilayah dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat terhadap wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah maka dapat



dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi atau tingkat kemakmuran masyarakatnya juga baik.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Kontribusi sektor pertanian Struktur PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti, masih relatif sama dengan struktur pada tahun-tahun sebelumnya. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Penajam Paser Utara yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 25,83 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 21,96 persen; Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 16,46 persen; Lapangan Usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 11,84 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 9,41 persen.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian ”, yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
3. Program peningkatan SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan/ peternakan lapangan
6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak



7. Program peningkatan produksi hasil peternakan
8. Program Pengembangan Usaha Perkebunan

SASARAN 8

Meningkatkan Distribusi Pangan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019		2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	84,28	Skor	87,64	91	103,83	94,84	95,95
Rata-rata Capaian Kinerja						103,83		95,95

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dengan kata lain, PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, pengembangan keanekaragaman pangan dari sisi konsumsi masyarakat Penajam Paser Utara mengalami peningkatan. Hal itu antara lain tercermin dari meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penajam Paser Utara dari 84,28 pada tahun 2019 menjadi 91,00 pada tahun 2020 dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.135 Kkal/Kapita per hari. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan ini melebihi dari skor Pola Pangan Harapan nasional 90,01.

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pergeseran pola pikir dan pola konsumsi pangan masyarakat untuk menerapkan konsumsi yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
2. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan tingkat rumah tangga karena pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.
3. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pangan lokal sehingga terpenuhinya karbohidrat yang bersumber dari pangan non beras.
4. Terlaksananya kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) secara luas di tingkat kelompok masyarakat yang dapat meningkatkan konsumsi sayur, buah, dan aneka pangan lokal.
5. Meningkatnya sosialisasi konsumsi pangan dan gizi seimbang.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Distribusi Pangan”, yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2. Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Program pengembangan budidaya perikanan
4. Program pengembangan perikanan tangkap
5. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan



SASARAN 9

Meningkatkan Daya Saing Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	62.848 Orang	75.944	14.371	18,92	407.937	34,02
2	NTP	- Indeks	103	-	-	105	-
3	Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	60 WUB	130	60	46,15	300	40
Rata-rata Capaian Kinerja					32,54		37,01

1. Tingkat Kunjungan Wisata

Tahun 2020 Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 24 objek wisata yang tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Objek wisata Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh pantai. Beberapa pantai yang terkenal diantaranya adalah Pantai Nipah-Nipah, Pantai Saloloang, Pantai Pejala, dan Pantai Corong. Selain pantai, terdapat wisata mangrove di daerah pesisir yang ditumbuhi tanaman bakau, seperti Ekowisata Hutan Mangrove Kampung Baru, serta terdapat wisata fauna, penangkaran rusa di Api-API.

Kunjungan Wisatawan pada Tahun 2020 Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 14.371 wisatawan dari tahun sebelumnya sebesar 62.848 wisatawan (menurun sebesar 22,87%). Sedangkan jika dibandingkan dengan target Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 sebesar 75.944 maka target 2020 tercapai sebesar 18,92 persen. Tingkat Kunjungan Wisata Tahun 2020 tidak tercapai seperti yang ditargetkan dan menurun dari tahun



2019 karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan pembatasan sosial berskala besar, bahkan penutupan sementara objek wisata.

2. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 dan 2020 tidak dapat ditampilkan karena tidak adanya kegiatan penghitungan terhadap Nilai Tukar Petani. Tetapi, jika melihat data Nilai Tukar Petani beberapa tahun sebelumnya, Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2017 sebesar 108,92 dan biasanya berada di atas Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Tukar Petani Kalimantan Timur Tahun 2019 sebesar 94,8 dan Tahun 2020 sebesar 114,97.

NTP lebih besar dari 100, berarti petani mengalami peningkatan dalam hal perdagangan. Kondisi tersebut terjadi ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.

3. Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif

Wirausaha Baru yang selanjutnya disingkat WUB adalah orang yang telah terseleksi sebagai peserta program pencetakan Wirausaha Baru.

Peningkatan Jumlah WUB bertujuan untuk :

- a. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja;



- b. Memeratakan distribusi pendapatan masyarakat;
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tahun 2020 terdapat 60 WUB di Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak ada penambahan WUB dari capaian Tahun 2019. Indikator kinerja ini hanya mencapai 46,15 persen dari yang ditargetkan 130 WUB.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Daya Saing Daerah”, yaitu :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
6. Program Pengembangan Kemitraan
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
9. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
10. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
11. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
13. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
14. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah



SASARAN 10**Meningkatkan Kerjasama Perekonomian**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	1.092 Perizinan	450	937	208,22	2.500	81,16
Rata-rata Capaian Kinerja					208,22		81,16

Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani

Jumlah Perizinan yang tertangani di tahun 2019 mencapai 1.092 izin, dan di Tahun 2020 sebanyak 937 izin. Banyaknya jumlah perizinan yang tertangani di Tahun 2019 disebabkan adanya program pemutihan IMB yang diadakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser utara yang tidak berlanjut di Tahun 2020 sehingga terjadi penurunan jumlah permohonan izin. Capaian Kinerja Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani Tahun 2020 sebesar 208,22 persen dari yang ditargetkan 450 perizinan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Kerjasama Perekonomian”, yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

SASARAN 11**Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Status Desa	Mandiri = 1 Maju = 7 Berkembang = 22 Tertinggal = 0	Mandiri = 0 Maju = 6 Berkembang = 24 Tertinggal = 0	Mandiri = 3 Maju = 9 Berkembang = 18 Tertinggal = 0	145	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 Tertinggal = 0	108
2	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	76,42 %	82	16,63	20,28	100	0,17
3	Persentase Kemiskinan	7,18 %	7,36	7,36	100	6,2	84,24
Rata-rata Capaian Kinerja					88,43		64,14

1. Status Desa

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni:

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Tahun 2020 Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tiga (3) Desa Mandiri, yaitu Desa Babulu Darat, Desa Giri Mukti dan Desa Sukaraja; sembilan

(9) Desa Maju; dan delapan belas (18) Desa Berkembang. Pencapaian ini mengalami



peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2019 dimana terdapat penambahan dua (2) Desa Mandiri. Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh adanya Program Pro P2KPM yang merekrut para pendamping teknis dalam meningkatkan pembangunan desa dan bantuan keuangan pemerintah daerah untuk pelatihan-pelatihan demi meningkatkan keterampilan masyarakat.

2. Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senantiasa menunjukkan komitmen dalam membangun infrastruktur daerah Penajam Paser Utara dengan mengaplikasikan berbagai ide inovasi sebagai percepatan pembangunan infrastruktur demi tersedianya pelayanan publik yang memadai. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejak Tahun 2013 mendirikan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum di tingkat kecamatan untuk menyelesaikan kendala infrastuktur di desa dan kelurahan sehingga mempersingkat jalur birokrasi yang panjang.

Tahun 2020 mengalami penurunan 21,76 persen dari Tahun 2019. Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan karena keterbatasan anggaran.



3. Persentase Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 sebesar 11.930 (7,36 persen), sedangkan pada tahun 2019 sebesar 11.520 (7,18 persen). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020.

Persentase Kemiskinan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2016	391.083	11.660	7,49
2017	426.111	12.000	7,63
2018	448.000	11.760	7,40
2019	466.918	11.520	7,18
2020	447.539	11.930	7,36

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan”, yaitu :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
4. Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Pedesaan Mandiri
5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
8. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
11. Program pembinaan anak terlantar
12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



13. Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial
14. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

SASARAN 12

Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	94 Km	163,71	23,15	14,14	1.206,06	9,71
2	Luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa	4,784 Ha	37,035	28,573	77,15	152,330	21,90
3	Persentase pemukiman yang tertata	99,68 %	99,75	99,72	99,97	99,90	99,82
4	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola masyarakat	230 SPAM	200	8	4	1.310	18,17
5	Jumlah bangunan/ gedung terbangun	9 Unit	3	0	0	17	52,94
6	Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan	43 Kejadian	9	31	29,03	46	62,16
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,07 Indeks	69,50	70,09	100,85	75,65	92,65
Rata-rata Capaian Kinerja					46,45		51,05

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap

Jalan Kondisi Baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis.

Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 tercatat sepanjang 1.371,53 km, dimana jalan negara sepanjang 58,5 km, jalan provinsi sepanjang 89 km, dan



jalan kabupaten/ kota sepanjang 1.224,03 km. Sebanyak 95,3 persen jalan provinsi di Kabupaten Penajam Paser Utara berada dalam kondisi mantap, dan 4,7 persen dalam kondisi tidak mantap. Sedangkan, 86,33 persen jalan negara memiliki kondisi baik, 8,55 persen sedang, 5,13 persen rusak, dan tidak ada jalan dengan kondisi rusak berat.

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2020 terealisasi sepanjang 23,15 Km di Tahun 2020, tercapai 14,14 persen dari yang ditargetkan. Ketidaktercapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada.

2. Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa

Tahun 2020 Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa seluas 28,573 Ha. Dari yang ditargetkan 37,035 tercapai sebesar 77,15 persen. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berupaya membangun jaringan irigasi yang tersebar di wilayah sentra pertanian seperti di Babulu Darat, Sebakung Jaya dan Labangka. Jaringan irigasi ini merupakan satu kesatuan sistem pengairan yang terintegrasi yang dibagi



berdasarkan saluran primer, sekunder dan tersier. Agar operasi dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik, kegiatan pengelolaan dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing yang terdiri dari pemerintah provinsi untuk saluran primer, pemerintah kabupaten untuk saluran sekunder dan masyarakat melalui Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) mengelola saluran tersier.

3. Persentase Pemukiman yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.



Berdasarkan RTRW Kab. PPU No. 3 Th 2014 Luas Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan adalah Sebesar 13,292 Ha. Pada tahun 2020 Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan 99,75 persen untuk indikator Persentase Pemukiman yang Tertata, terealisasi adalah 99,72 persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,72 persen.

4. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas.



Pada Tahun 2020 Kabupaten Penajam Paser Utara Mendapatkan Alokasi 8 Desa/Kelurahan yang mendapatkan Program Pamsimas, yaitu:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Gunung Intan | 5. Gunung Makmur |
| 2. Api-Api | 6. Babulu Laut |
| 3. Bumi Harapan | 7. Sri Raharja |
| 4. Sumber Sari | 8. Bukit Subur |

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat sebanyak 200 SPAM dan terealisasi sebanyak 8 SPAM, sehingga capaian kinerja 4 persen.



5. Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Salah satu permasalahan sarana pelayanan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan.

Pada Tahun 2020 tidak ada pembangunan bangunan/ gedung terbangun. Dari yang ditargetkan 3 bangunan/ gedung terbangun tidak dapat terealisasi sehingga capaian kinerjanya 0 persen. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.

6. Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan

Tahun 2020 terjadi 31 kejadian, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi 43 kejadian. Target Angka Kecelakaan Darat dan Perairan 9 kejadian, terealisasi 43 kejadian sehingga capaian kinerjanya sebesar 29,03 persen. Tingginya Angka Kecelakaan Darat dan Perairan atau rendahnya persentase capaian kinerja Angka Kecelakaan Darat dan Perairan disebabkan oleh faktor kelalaian pengguna jalan, faktor kondisi jalan yang kurang baik, faktor kendaraan, dan faktor kondisi alam.

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

1. Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas/ Pencemaran Air
2. Indeks Kualitas/ Pencemaran Udara



3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan target untuk IKLH sebesar 69,50. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 sebesar 70,09, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,85 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu 69,07, IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan. Berdasarkan rentang nilai IKLH, nilai IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara masih dalam kategori “CUKUP”.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”, yaitu :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
4. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
5. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan
8. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
9. Program pengelolaan areal pemakaman
10. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedasaan
12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
13. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
14. Program peningkatan pelayanan angkutan
15. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
16. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
17. Program pengendalian banjir
18. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
19. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
20. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
21. Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air



SASARAN 13**Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)	90 %	90,55	92,96	102,66	92,05	100,99
2	Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	12 Ha	20	13	65	110	22,73
Rata-rata Capaian Kinerja					83,83		61,86

1. Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau yang diatur di dalam undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah.

Berdasarkan hasil analisa neraca tata ruang yang telah dibuat persentase kesesuaian antara penggunaan lahan aktual dengan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 92,96 persen. Capaian persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2019 dan masih di atas target yaitu 102,66 persen.

2. Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat

Tahun 2020 Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat bertambah 13 Ha. Jika ditambahkan dengan Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat pada kondisi akhir Tahun 2018, maka sampai dengan Tahun 2020 Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat seluas 3.015,32.

Indikator kinerja Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 seluas 1 Ha. Target Tahun 2020 seluas 20 Ha terealisasi 13 Ha sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 65 persen.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman”, yaitu :

1. Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi diwilayah Pasca Bencana
3. Program Pengadaan dan penyiapan peralatan dan logistik di kawasan terjadi bencana
4. Program Penanggulangan Kebakaran
5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
6. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

SASARAN 14

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	100 %	70	63,59	90,84	85	74,81
2	Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 24 Jam	< 24	< 6	400	< 6	100
3	Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	100 %	76	30,89	40,64	80	30,89
4	Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	-	120	185,24	154,37	200	92,62
Rata-rata Capaian Kinerja					171,46		74,58

1. Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Prioritas program pengurangan risiko bencana, yaitu:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;
2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah;
3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat;
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar;
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

Indikator kinerja Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Tahun 2020 terealisasi 63,59 persen, kurang dari yang ditargetkan 70 persen. Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang terealisasi sebesar 100 persen.



2. Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana

Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana adalah waktu yang dibutuhkan bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dari sejak pertama kali menerima informasi kejadian bencana, hingga tiba di lokasi kejadian bencana.



Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana Tahun 2020 ditargetkan tidak lebih dari 24 jam (<24 jam) dapat terealisasi tidak lebih dari 6 jam (<6 jam), sehingga capaian kinerja sebesar 400 persen. Realisasi Kinerja Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu <24 jam mengalami peningkatan kinerja menjadi <6 jam. Salah satu kendala yang ditemukan dalam respon kejadian bencana adalah jarak tempuh ke lokasi kejadian bencana.

3. Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

Tahun 2020 Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 dimana capaiannya sebesar 100 persen. Realisasi capaian Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana Tahun 2020 sebesar 30,89 persen dengan persentase capaian sebesar 40,64 persen. Rendahnya capaian ini diakibatkan oleh faktor kekurangan anggaran yang ada.



4. Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan

Perbandingan antara target tahun ini dengan realisasinya sangat baik, yaitu mencapai 154,37 persen dan melampaui target yang direncanakan. Hal ini dikarenakan berkurangnya aktivitas masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar untuk lahan pertanian. Selain itu cuaca yang cenderung sering hujan membuat lahan menjadi basah sehingga tidak mudah terbakar. Realisasi capaian kinerja tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya, situasi dimasa pandemi dan pembatasan aktivitas di masyarakat memicu menurunnya jumlah kebakaran hutan dan lahan, sehingga secara tidak langsung berefek terhadap terjaganya kawasan rawan kebakaran. Penyebab keberhasilan dari capaian kinerja ini adalah cara bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat untuk tidak membakar hutan/ lahan mereka, selain itu adanya kebijakan pemerintah tentang ancaman bagi pembakar hutan/ lahan membuat para pelaku pembakar lahan berfikir dua kali untuk melakukan aksinya, ditambah



beberapa kasus penindakan terhadap pelaku pembakar lahan yang berujung di tahanan Polres Penajam Paser Utara jelas menunjukkan bahwa kebakaran hutan/ lahan bukan hal yang bisa diremehkan.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan kedepannya akan terus meningkatkan kinerja pelayanan ke masyarakat demi menjaga keamanan masyarakat dari bahaya kebakaran dan penyelamatan dari hewan berbahaya dan berbisa. Pada Tahun 2019 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menggagas inovasi sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran mandiri untuk desa sebagai solusi untuk pencegahan dini terjadinya kebakaran di setiap desa/ kelurahan, namun inovasi tersebut terkendala dengan pembiayaan dari desa dan pemerintah daerah, sehingga perlu adanya dukungan dari pengambil kebijakan penganggaran untuk merealisasikannya, sehingga kedepannya desa/kelurahan dapat secara mandiri melakukan pencegahan kebakaran di wilayah mereka masing-masing sebelum Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan datang untuk memberi bantuan dengan armada pemadam kebakaran.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan”, yaitu :

1. Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi diwilayah Pasca Bencana
3. Program Pengadaan dan penyiapan peralatan dan logistik di kawasan terjadi bencana
4. Program Penanggulangan Kebakaran
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
6. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan



SASARAN 15**Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan PAD	99.735.981.014,84 Rp	180.567.469.806	88.250.948.814,26	48,87	1.364.708.196.224	13,77
Rata-rata Capaian Kinerja					48,87		13,77

Peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 adalah Rp 88.250.948.814,26. Jumlah ini menurun sebesar 11,52 persen dibanding PAD tahun 2019 sebesar Rp99.735.981.014,84. Realisasi PAD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 lebih kecil dibanding target PAD yang ditetapkan sebesar Rp 180.567.469.806 atau dengan capaian sebesar 48,87 persen. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp24.399.995.194,00, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp13.832.494.020,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 4.278.067.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 58.798.455.295,00.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi”, yaitu :

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

SASARAN 16

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	CC	B	-	-	B	-
Rata-rata Capaian Kinerja					117,65		111,11

Predikat Akuntabilitas (LKjIP)

Predikat Akuntabilitas diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai berfungsinya implementasi dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Predikat Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 belum diperoleh dari Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PAN dan RB). Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
2. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
7. Program Penataan Peraturan
8. Perundang-undangan

9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

SASARAN 17

Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik yang Berbasis Web

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	38 Aplikasi	43	48	111,63	68	70,59
Rata-rata Capaian Kinerja					111,63		70,59

Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi

Paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*), hal ini sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas. Prinsip - prinsip pelayanan publik digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas di dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik termasuk dalam hal ini adalah sebagai dasar pengembangan *e-government*.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berusaha membuat dan mengembangkan berbagai aplikasi yang menyajikan berbagai data dan informasi yang memberikan kemudahan dalam aksesibilitas.

Tahun 2020 realisasi atas Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi sebanyak 48 aplikasi. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 terdapat penambahan 10 aplikasi di Tahun 2020. Capaian indikator ini juga telah melebihi yang ditargetkan 43 aplikasi dengan capaian sebesar 111,63 persen. Optimalisasi atas aplikasi layanan publik yang berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu manajemen jaringan, hal tersebut mengakibatkan kurangnya control atas pemakaian serta pemeliharaan aplikasi tersebut. Proses integrasi aplikasi tersebut terkendala dengan

adanya Peraturan Presiden no. 95 tahun 2018 tentang System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web”, yaitu :

1. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
2. Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian
3. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

SASARAN 18

Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus	0	0	100	0	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100		100

Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama

Cara pandang terhadap agama dengan menempatkan agama sebagai sumber konflik, telah menimbulkan berbagai upaya menafsirkan kembali ajaran agama dan kemudian dicarikan titik temu pada level tertentu, dengan harapan konflik di antara umat beragama akan redam jika antar pemeluk agama saling toleran.

Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 tidak ditemukan atau tidak ada kasus/ konflik, hal ini dikarenakan tetap terjaganya suasana yang kondusif. Kasus/ konflik bernuansa agama dapat dihindari dengan berbagai upaya, seperti:

1. Melakukan Pembinaan dan koordinasi rutin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan organisasi keagamaan;

2. Meningkatkan peran organisasi keagamaan;
3. Memperingati hari-hari besar keagamaan;
4. Melaksanakan dialog-dialog lintas umat beragama;
5. Melaksanakan dialog-dialog kebangsaan;
6. Melakukan pembinaan terhadap Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta organisasi paguyuban yang ada;
7. Melakukan koordinasi dengan paguyuban-paguyuban dan organisasi sosial budaya lainnya.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama”, yaitu :

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan
2. Program pendidikan politik masyarakat
3. Program Pembinaan Keagamaan

SASARAN 19

Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	86	76	88,37	90	84,44
Rata-rata Capaian Kinerja					88,37		84,44

Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian indikator kinerja Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Tahun 2020 terealisasi 76 persen, kurang dari yang ditargetkan 86 persen. Masih banyaknya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Tahun 2020 dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yaitu:

1. Secara intens melakukan tindakan penertiban nonyustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda/perkada;
2. Melakukan sosialisasi perda/perkada secara masif kepada masyarakat;
3. Melakukan pembinaan dan peringatan dalam rangka menekan angka pelanggaran perda/perkada.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Peraturan Perundang-Undangan”, yaitu :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2020 secara umum dapat mencapai target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari 19 sasaran yang ditargetkan, tercapai dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi. Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran sebesar 141,42 persen dengan interpretasi “*sangat berhasil*”.



Perolehan rata-rata nilai kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

**Perolehan Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020**

Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Tahun 2020 (%)	Interpretasi
Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat	-74,76	Kurang Berhasil
Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran	45,82	Kurang Berhasil
Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	Meningkatkan investasi di kawasan industri	995,51	Sangat Berhasil
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	90,99	Sangat Berhasil
	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	-	-
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	72,10	Cukup Berhasil
Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	190,96	Sangat Berhasil
	Meningkatkan distribusi pangan	103,83	Sangat Berhasil
Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah	32,54	Kurang Berhasil
	Meningkatkan kerjasama perekonomian	208,22	Sangat Berhasil
Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	88,43	Sangat Berhasil
Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	46,4	Kurang Berhasil
Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	83,83	Berhasil
Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	171,46	Sangat Berhasil



Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Tahun 2020 (%)	Interpretasi
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	48,87	Kurang Berhasil
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-
Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	111,63	Sangat Berhasil
Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100	Sangat Berhasil
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	88,37	Sangat Berhasil
Rata-rata Nilai Capaian Kinerja		141,42	Sangat Berhasil

B

Realisasi Anggaran

Efektivitas dan efisiensi alokasi belanja Negara dengan mengacu kepada penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Belanja daerah digunakan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah diutamakan pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

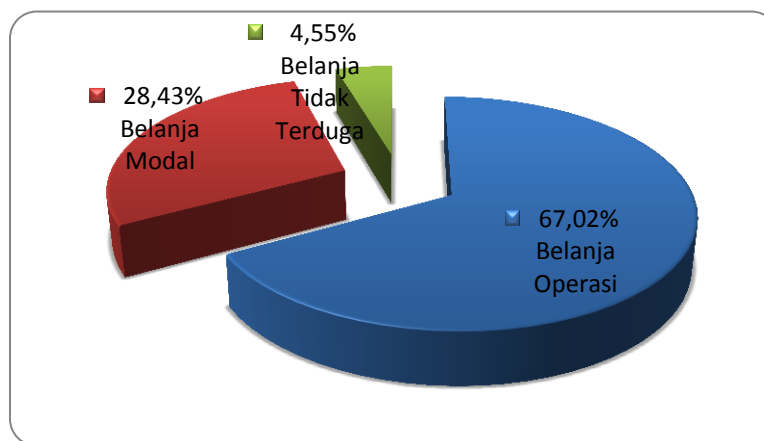
Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 sebesar Rp 1.548.725.560.847,00 dengan rincian sebagai realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 1.329.245.320.255,99 dan realisasi belanja sebesar Rp 1.387.386.259.647,71 sehingga terjadi defisit sebesar Rp 58.140.939.391,72. Sementara itu realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 93.192.379.650,12 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp 13.216.714.416,40.



Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 851.876.944.898,81, Belanja Modal sebesar Rp 361.340.242.742,90, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 57.840.705.125,00.

Proporsi Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2020



Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pada Tahun 2020 Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 93.192.379.650,00 bertambah 5,92 persen dibanding Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 yang sebesar Rp 87.678.699.130,00. Pada Tahun 2020 terdapat Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan jumlah Rp 51.314.725.842,00 sehingga di tahun 2020 Pembiayaan Neto Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 41.877.653.808,00.



Laporan Realisasi APBD T.A 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Unaudited)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.548.725.560.847,00	1.329.210.020.255,99	85,83%	1.606.774.948.876,21
1.1	PENDAPATAN ASLI				
1.1.1	DAERAH				
1.1.2	Pendapatan Pajak Daerah	24.399.995.194,00	22.807.535.557,97	93,47%	23.004.622.021,67
1.1.3	Pendapatan Retribusi Daerah	13.832.494.020,00	10.716.581.515,60	77,47%	9.150.885.925,25
1.1.4	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.278.067.000,00	2.318.899.829,43	54,20%	4.078.067.768,59
		58.798.455.295,00	52.291.990.341,26	88,93%	57.257.852.710,68
1.2	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	101.309.011.509,00	88.135.007.244,26	87,00%	93.491.428.426,19
1.2.1	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak	75.512.586.000,00	80.665.631.486,00	106,82%	67.500.359.374,00
1.2.1.3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya	669.509.822.983,00	465.632.546.216,00	69,55%	736.620.944.539,00
1.2.1.4	Alam Dana Alokasi Umum	277.611.967.000,00	275.868.751.000,00	99,37%	278.328.579.000,00
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus	46.643.660.000,00	43.214.328.612,00	92,65%	48.771.572.836,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	63.023.251.599,00	62.563.893.490,00	99,27%	57.203.885.119,00
1.2.2	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.132.301.287.582,00	927.945.150.804,00	81,95%	1.188.425.340.868,00
1.2.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.2	Dana Otonomi	-	-	-	-
1.2.2.3	Khusus Dana Penyesuaian	36.490.369.000,00	36.490.369.000,00	100,00%	34.774.857.000,00
		27.240.345.000,00	27.240.345.000,00	100,00%	10.028.749.000,00
1.2.3	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	63.730.714.000,00	63.730.714.000,00	100,00%	44.803.606.000,00
1.2.3.1	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.2.3.2	Hasil Pajak Pendapatan Bagi	115.360.002.756,00	115.760.002.756,00	100,35%	143.800.000.000,00
1.3	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	200.024.007.756,00	200.422.544.845,00	100,20%	256.699.178.708,00
1.3.1	Hasil Pajak Pendapatan Bagi				
1.3.2	Hasil lainnya Bantuan Keuangan	1.396.056.009.338,00	1.192.098.409.649,00	85,39%	1.489.928.125.576,00
1.3.3	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	51.360.540.000,00	48.976.603.362,73	95,36%	23.355.394.874,02
1.3.3.3	Total Pendapatan	51.360.540.000,00	48.976.603.362,73	95,36%	23.355.394.874,02
	Transfer	51.360.540.000,00	48.976.603.362,73	95,36%	23.355.394.874,02
	Jumlah Pendapatan	1.548.725.560.847,00	1.329.210.020.255,99	85,83%	1.606.774.948.876,21
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai	551.771.662.347,00	519.277.167.778,00	94,11%	545.131.118.159,00
2.1.2	Belanja Pegawai	367.174.589.456,00	290.481.608.692,81	79,11%	270.000.735.893,23
2.1.3	Belanja Barang	10.842.882.523,00	10.784.834.528,00	99,46%	25.913.448.052,00
2.1.4	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Subsidi	34.439.732.400,00	30.245.333.900,00	87,82%	21.925.224.051,00
2.1.6	Belanja Hibah	10.825.363.000,00	1.088.000.000,00	10,05%	248.200.000,00
2.2	Jumlah Belanja Operasi	975.054.229.726,00	851.876.944.898,81	87,37%	863.218.726.155,23
2.2.1	BELANJA MODAL				
2.2.2	Belanja Tanah	13.491.134.965,00	6.037.048.468,00	44,75%	14.047.670.957,00
2.2.3	Belanja Peralatan dan Mesin	84.068.497.253,00	77.882.221.674,90	92,64%	58.009.164.767,01
2.2.4	Belanja Gedung dan Bangunan	121.012.691.630,00	99.011.646.613,00	81,82%	45.310.432.466,00
2.2.5	Belanja Irigasi dan Jaringan	200.895.005.876,00	174.169.216.670,00	86,70%	432.703.515.501,00
2.2.6	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.081.777.884,00	4.240.109.317,00	83,44%	98.800.000,00
2.3	Jumlah Belanja Modal	424.549.107.608,00	361.340.242.742,90	85,11%	550.169.583.691,01
2.3.1	Jumlah Belanja Modal	74.316.869.044,00	57.840.705.125,00	77,83%	1.818.249.000,00
	Jumlah Belanja Modal	1.473.920.206.378,00	1.271.057.892.766,71	86,24%	1.415.206.558.846,24

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	2019
1	2	3	4	5	6
3	TRANSFER	-	-		-
3.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	-	-		-
3.1.1	Bagi Hasil	-	-		-
3.1.2	Pajak Bagi	-	-		-
3.1.3	Hasil Retribusi	-	-		-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-		-
3.2	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	-	-	0,00%	1.509.360.000,00
3.2.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	115.911.194.801,00	115.521.252.939,00	99,66%	141.914.788.940,00
3.2.2	Lainnya Bantuan Keuangan ke Desa	771.813.476,00	771.813.476,00	100,00	748.882.382,00
3.2.2	Bantuan Keuangan Lainnya			%	
	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	116.683.008.277,00	116.293.066.415,00	99,67	144.173.031.322,00
	Jumlah Transfer	116.683.008.277,00	116.293.066.415,00	%	144.173.031.322,00
	Jumlah Belanja dan Transfer	1.590.603.214.655,00	1.387.350.959.181,71	87,22	1.559.379.590.168,24
	Surplus/ (Defisit)	(41.877.653.808,00)	(58.140.938.925,72)	138,84%	47.395.358.707,97
4	PEMBIAYAAN				
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	93.192.379.650,00	93.192.379.650,12	100,00	84.976.526.830,15
4.1.1	Penggunaan SiLPA	93.192.379.650,00	93.192.379.650,12	100,00	56.989.224.114,15
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4.1.4	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	-	-
4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
4.1.6	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
4.1.7	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	27.987.302.716,00
4.1.8	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-	-
4.1.9	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-	-	-
4.1.10	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
4.1.11	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
4.1.12	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	93.192.379.650,00	93.192.379.650,12	100,00	84.976.526.830,15
4.2	PENGELUARAN DAERAH	51.314.725.842,00	21.834.725.842,00	42,55%	39.179.505.888,00
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
4.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	38.980.000.000,00	9.500.000.000,00	24,37%	3.000.000.000,00
4.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	-	-
4.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah	-	-	-	-
4.2.5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
4.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	12.334.725.842,00	12.334.725.842,00	100,00	36.179.505.888,00
4.2.7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-	-
4.2.8	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-	-	-
4.2.9	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
4.2.10	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
4.2.11	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	51.314.725.842,00	21.834.725.842,00	42,55	39.179.505.888,00
	Pembiayaan	41.877.653.808,00	71.357.653.808,12	170,40	45.797.020.942,15
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	13.216.714.882,40	-	93.192.379.650,12



Realisasi anggaran pada program-program yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2020 dirincikan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program T.A 2020

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	71.306.708.432,00	67.266.432.399,00	94,33
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	17.746.112.920,00	16.434.137.972,00	92,61
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4.900.915.939,00	3.385.759.268,00	69,08
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	419.484.000,00	376.632.860,00	89,78
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	94.992.249.525,00	86.776.128.002,71	91,35
6	Program Pendidikan Non Formal	19.734.600,00	19.611.100,00	99,37
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.068.900.000,00	18.943.859.878,00	99,34
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	264.695.690,00	241.714.000,00	91,32
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	469.409.500,00	458.801.450,00	97,74
10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	808.187.717,00	656.663.369,00	81,25
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	38.565.396.694,00	27.030.264.851,00	70,09
12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	9.691.000,00	8.275.000,00	85,39
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	945.868.250,00	432.371.070,00	45,71
14	Program Pemberantasan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	105.403.000,00	102.845.000,00	97,57
15	Program Pelayanan Kesehatan	1.669.107.500,00	128.959.100,00	7,73
16	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	30.240.509.312,00	26.802.023.802,00	88,63
17	Program peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia	17.500.000,00	17.150.000,00	98,00
18	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	23.234.151.349,00	12.542.714.163,00	53,98
19	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	4.626.895.836,00	1.538.055.832,00	33,24
20	Upaya Kesehatan Lainnya	805.406.222,00	166.245.500,00	20,64
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	6.386.000.599,00	3.100.964.183,00	48,56
22	Program Surveilans dan Imunisasi	12.120.000,00	12.120.000,00	100,00
23	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/ rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakit mata	4.409.273.000,00	4.370.663.807,00	99,12
24	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	31.000.000.000,00	35.905.950.372,00	115,83
25	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	113.238.030.722,00	95.946.730.103,00	84,73
26	Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong	55.610.343.484,00	51.831.103.286,00	93,20
27	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	22.013.538.000,00	21.460.542.675,00	97,49
28	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.956.976.000,00	2.136.586.150,00	72,26
29	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	19.436.880.000,00	18.435.421.998,00	94,85
30	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	493.930.000,00	493.930.000,00	100,00



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
31	Program pengendalian banjir	6.084.046.000,00	5.249.291.656,00	86,28
32	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	97.060.509.100,00	79.181.728.675,00	81,58
33	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	11.827.413.424,00	9.896.028.235,00	83,67
34	Program Perencanaan Tata Ruang	190.275.990,00	79.040.348,00	41,54
35	Program Pemanfaatan Ruang	162.434.000,00	84.431.700,00	51,98
36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	145.291.418,00	132.932.426,00	91,49
37	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	1.833.113.500,00	1.548.154.159,00	84,45
38	Program Pengembangan Perumahan	750.238.400,00	519.576.700,00	69,25
39	Program Lingkungan Sehat Perumahan	57.427.600,00	17.005.000,00	29,61
40	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	15.000.000,00	-	0,00
41	Program pengelolaan areal pemakaman	1.129.010.000,00	1.105.451.100,00	97,91
42	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	4.902.065.000,00	4.846.263.549,00	98,86
43	Program Peningkatan Estetika Ruang Terbuka Hijau	74.268.800,00	58.196.610,00	78,36
44	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	118.686.410,00	107.280.600,00	90,39
45	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	5.000.000,00	4.972.500,00	99,45
46	Program Penanggulangan Kebakaran	43.651.250,00	43.593.000,00	99,87
47	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
48	Program pencegahan dan pengurangan/ menghilangkan resiko bencana	106.444.100,00	77.970.300,00	73,25
49	Program Pengendalian Penanganan Bencana	157.661.250,00	149.083.000,00	94,56
50	Program peningkatan disiplin aparatur	874.665.534,00	870.222.700,00	99,49
51	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	286.505.000,00	284.862.875,00	99,43
52	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	484.783.290,00	424.007.090,00	87,46
53	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	36.675.000,00	36.616.200,00	99,84
54	Program pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana	41.945.000,00	36.600.000,00	87,26
55	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi di wilayah Pasca Bencana	28.779.105.000,00	8.889.671.995,00	30,89
56	Program Pengadaan dan penyiapan peralatan dan logistik di kawasan terjadi bencana	2.547.500.000,00	2.430.463.410,00	95,41
57	Program Tanggap Darurat di wilayah bencana	241.582.000,00	241.534.000,00	99,98
58	Program pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	2.875.000,00	1.525.000,00	53,04
59	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	230.903.720,00	227.602.200,00	98,57
60	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	90.990.000,00	90.253.280,00	99,19
61	Program pembinaan anak terlanjur	26.630.000,00	25.269.100,00	94,89



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
62	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3.000.000,00	-	0,00
63	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	20.057.000,00	20.011.500,00	99,77
64	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	19.167.610,00	19.138.100,00	99,85
65	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	18.884.150,00	18.335.000,00	97,09
66	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	72.904.900,00	70.832.198,00	97,16
67	Program Sistem Data Gender dan Anak	33.721.395,00	33.721.000,00	100,00
68	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	31.924.363,00	31.068.763,00	97,32
69	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	23.329.798,00	21.400.000,00	91,73
70	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3.715.000,00	3.444.800,00	92,73
71	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	28.748.952,00	27.069.200,00	94,16
72	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan	267.953.300,00	260.893.629,00	97,37
73	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	10.090.787.565,00	2.284.859.994,00	22,64
74	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	323.641.133,00	281.026.826,00	86,83
75	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.988.411.200,00	1.921.940.279,00	96,66
76	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	1.228.500.000,00	1.220.885.000,00	99,38
77	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.967.783.980,00	10.800.728.239,00	98,48
78	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	600.500.978,00	569.559.042,00	94,85
79	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	555.643.460,00	549.947.099,00	98,97
80	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	22.146.560,00	21.575.000,00	97,42
81	Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	948.000,00	948.000,00	100,00
82	Program Penataan Administrasi Kependudukan	927.167.700,00	895.919.239,00	96,63
83	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	545.978.229,00	452.035.853,00	82,79
84	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	10.960.000,00	7.840.000,00	71,53
85	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.077.164.000,00	994.016.789,00	92,28
86	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	88.620.000,00	77.187.100,00	87,10
87	Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	53.900.000,00	48.177.500,00	89,38
88	Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri	4.894.883.140,00	4.440.962.531,00	90,73
89	Program Keluarga Berencana	2.458.727.950,00	1.355.345.263,00	55,12
90	Program pelayanan kontrasepsi	43.155.000,00	38.771.910,00	89,84
91	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	24.253.400,00	24.096.800,00	99,35
92	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.014.619.700,00	1.941.651.866,00	96,38
93	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.099.990.000,00	1.001.634.000,00	91,06



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
94	Program peningkatan pelayanan angkutan	184.223.900,00	177.312.050,00	96,25
95	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	200.000.000,00	196.052.000,00	98,03
96	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	356.526.500,00	328.448.350,00	92,12
97	Program kerjasama informasi dan media massa	2.734.907.000,00	2.543.128.833,00	92,99
98	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.067.858.208,00	4.968.418.200,00	98,04
99	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	10.240.000,00	6.831.250,00	66,71
100	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian	27.656.470,00	27.656.400,00	100,00
101	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	50.000.000,00	49.885.000,00	99,77
102	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	38.300.000,00	38.250.000,00	99,87
103	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
104	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	18.500.000,00	18.495.000,00	99,97
105	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	193.837.500,00	185.916.967,00	95,91
106	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	689.244.100,00	608.531.332,00	88,29
107	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	66.710.000,00	64.098.300,00	96,08
108	Program peningkatan peran serta kepemudaan	405.780.000,00	392.909.537,00	96,83
109	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	370.043.300,00	367.134.027,00	99,21
110	Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	1.216.355.000,00	1.202.311.078,00	98,85
111	Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	157.810.000,00	95.007.800,00	60,20
112	Program Monitoring dan Evaluasi Data Statistik	168.056.000,00	138.148.400,00	82,20
113	Program Pengembangan Nilai Budaya	195.795.000,00	192.416.100,00	98,27
114	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	505.000.001,00	485.410.850,00	96,12
115	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	67.021.200,00	67.018.200,00	100,00
116	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	91.540.000,00	89.660.790,00	97,95
117	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	31.519.700,00	31.365.600,00	99,51
118	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	6.150.000,00	5.881.200,00	95,63
119	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1.753.250,00	1.746.160,00	99,60
120	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	7.619.813,00	6.270.400,00	82,29
121	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	127.400.000,00	119.400.000,00	93,72
122	Program pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	23.827.600,00	22.855.600,00	95,92
123	Program pengembangan budidaya perikanan	539.211.000,00	534.897.300,00	99,20
124	Program pengembangan perikanan tangkap	4.613.890.650,00	4.221.738.900,00	91,50
125	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	38.300.000,00	38.298.500,00	100,00
126	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	25.181.420,00	24.142.300,00	95,87
127	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	146.780.000,00	142.772.400,00	97,27



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
128	Program peningkatan SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan	14.587.955,00	14.379.000,00	98,57
129	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	60.000.000,00	57.530.000,00	95,88
130	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	52.127.833,00	52.013.900,00	99,78
131	Program Pengembangan Kemitraan	741.007.265,00	729.939.925,00	98,51
132	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	574.363.175,00	554.716.790,00	96,58
133	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	404.799.250,00	349.235.580,00	86,27
134	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	38.149.750,00	38.040.250,00	99,71
135	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	880.656.750,00	868.487.741,00	98,62
136	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan/ peternakan lapangan	79.615.000,00	75.765.000,00	95,16
137	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	320.546.000,00	313.433.415,00	97,78
138	Program peningkatan produksi hasil peternakan	408.033.800,00	385.589.953,00	94,50
139	Program Pengembangan Usaha Perkebunan	88.255.000,00	87.739.000,00	99,42
140	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	3.540.689.670,00	1.268.805.950,00	35,83
141	Program Energi dan Sumber Daya Mineral	131.600.000,00	129.190.200,00	98,17
142	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	235.347.500,00	235.127.150,00	99,91
143	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.289.923.500,00	1.352.074.928,00	41,10
144	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	25.225.000,00	24.896.400,00	98,70
145	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	261.368.212,00	258.250.503,00	98,81
146	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	8.150.000,00	7.687.000,00	94,32
147	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.556.708.800,00	1.356.721.910,00	87,15
148	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	217.748.176,00	130.733.179,00	60,04
149	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	33.390.000,00	28.013.500,00	83,90
150	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	164.040.000,00	136.192.800,00	83,02
151	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	241.665.685,00	223.852.800,00	92,63
152	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.613.116.368,00	2.180.568.580,00	83,45
153	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	106.400.000,00	102.369.227,00	96,21
154	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	61.720.000,00	54.227.100,00	87,86
155	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.483.036.758,00	14.018.066.867,00	75,84
156	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	438.077.200,00	346.518.750,00	79,10
157	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	27.750.000,00	23.093.982,00	83,22
158	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.785.106.400,00	3.289.243.574,00	86,90
159	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	627.100.000,00	616.064.600,00	98,24
160	Program Pengembangan Data dan Informasi	366.013.175,00	337.297.654,00	92,15



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
161	Program Kerjasama Pembangunan	58.241.800,00	29.089.800,00	49,95
162	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	248.508.800,00	172.789.837,00	69,53
163	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.029.036.500,00	2.927.756.732,00	96,66
164	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3.124.651.250,00	3.049.419.096,00	97,59
165	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	326.095.400,00	304.631.612,00	93,42
166	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	233.721.135,00	184.137.775,00	78,79
167	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/ Kantor/ Fasilitas Umum	1.011.800.000,00	838.142.979,00	82,84
168	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	10.994.750.940,00	7.605.023.062,00	69,17
169	Program Pelayanan Kedinasan	25.310.000,00	21.467.000,00	84,82
170	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum	567.000.000,00	551.086.148,00	97,19
171	Program Pembangunan Daerah	992.498.774,00	941.565.300,00	94,87
172	Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah	125.000.000,00	70.665.415,00	56,53
173	Program Penanganan Bidang Hukum	437.032.000,00	417.098.200,00	95,44
174	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	24.930.477.626,00	20.926.115.865,00	83,94
175	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan	453.000.000,00	446.400.000,00	98,54
176	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	220.581.834,00	219.679.000,00	99,59
177	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.183.949.500,00	1.098.801.793,00	92,81
178	Program pendidikan politik masyarakat	243.561.600,00	199.893.200,00	82,07
179	Program ketahanan sosial dan ekonomi	26.678.766,00	25.323.500,00	94,92
180	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan	9.160.216.463,00	8.748.014.673,00	95,50
181	Program Pembinaan Keagamaan	800.930.280,00	781.630.280,00	97,59
182	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	33.872.677.455,00	23.201.717.261,00	68,50
Jumlah Anggaran		913.953.279.497,00	762.928.931.678,71	83,48



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 rata-rata menggambarkan kinerja yang sangat baik. Dari 19 sasaran strategis yang ditetapkan hampir seluruhnya berhasil dicapai dengan sangat baik namun masih ada beberapa indikator kinerja sasaran yang capaiannya kurang baik atau belum optimal.

Capaian kinerja yang sudah sangat baik maupun yang belum menjadi suatu motivasi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun depan. Dari hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, dapat dirumuskan beberapa strategi solusi bagi kendala yang ada dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh OPD pada setiap kesempatan tentang pentingnya Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu dan akurasi data yang dihimpun.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan

datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-perbaikan di berbagai sektor sebagaimana dijelaskan di atas.



LAMPIRAN



Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA
TAHUN : 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13 ± 1 %
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,85 %
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	57.415.400.000 Rupiah
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	14,86 Tahun
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,7 Tahun
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,50 Tahun
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai <i>Event</i> Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Medali
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	69,38 %
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	635 Skor
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	11,50 %

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87,64	Skor
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	75.944	Orang
		NTP	103	Indeks
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	130	WUB
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	450	Perizinan
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 6 Berkembang = 24 Tertinggal= 0 Sangat Tertinggal = 0 Desa	
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa % 82	
		Persentase kemiskinan	7,36	%
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	163,71	Km
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	37,035	Ha
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99,75	%
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	200	SPAM

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3 Unit
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9 Kejadian
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,50 Indeks
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	90,55 %
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	20 Ha
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	70 %
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 24 Jam
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	76 %
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	120 Ha
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	180.567.469.806 Rupiah
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	43 Aplikasi

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	86 %



Perjanjian Kinerja

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.13 ± 1 %
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.85%
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai Investasi	Rp 57,415,400,000
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-Rata Lama Sekolah	14.85 Tahun
		Harapan Lama Sekolah	10.7 Tahun
		Angka Harapan Hidup	71.50 Tahun
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Medali
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69.38 %
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	635 Poin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	11.50%
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87.64
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata	75,944 Orang
		NTP	103
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	130 WUB
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	450 Izin
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 0 Desa Maju = 6 Desa Berkembang = 24 Desa Tertinggal = 0 Desa Sangat Tertinggal = 0 Desa
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 Kelurahan dan 30 Desa (82%)
		Persentase Kemiskinan	7.36 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	163.71 Km
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa	37,035 Ha
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99.75%
		Jumlah SPAM yang Dikelola Masyarakat	200
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3 Bangunan/ Gedung
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9 %
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69.50
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya	90.55%
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	20
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Prosentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	70%
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	<24 jam
		Prosentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pascabencana	76%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	120 Ha
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	Rp 180.567.469.806
16	Meningkatkan TataKelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	43 Aplikasi
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	86%

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum	1.011.800.000,00
2	Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri	4.894.883.140,00
3	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	1.228.500.000,00
4	Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	948.000,00
5	Program Kerjasama Pembangunan	27.291.800,00
6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	164.040.000,00
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	43.155.000,00
8	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	11.827.413.424,00
9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Peternakan Lapangan	79.615.000,00
10	Program Pembinaan Keagamaan	56.000.000,00
11	Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	484.783.290,00
12	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.073.150.000,00
13	Program Pencegahan dan Pengurangan/Menghilangkan Resiko Bencana	28.234.100,00
14	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	157.810.000,00
15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	60.000.000,00
16	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	10.994.750.940,00
17	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	811.086.750,00
18	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	72.904.900,00
19	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	20.057.000,00
20	Program Energi dan Sumber Daya Mineral	131.600.000,00

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
21	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	10.240.000,00
22	Program Keluarga Berencana	2.458.727.950,00
23	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	220.581.834,00
24	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	23.234.151.349,00
25	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	2.734.907.000,00
26	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan	453.000.000,00
27	Program Kerjasama Pembangunan	30.950.000,00
28	Program Ketahanan Sosial dan Ekonomi	26.678.766,00
29	Program Lingkungan Sehat Perumahan	57.427.600,00
30	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	264.695.690,00
31	Program Monitoring dan Evaluasi Data Statistik	168.056.000,00
32	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	808.187.717,00
33	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian	27.656.470,00
34	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	25.181.420,00
35	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	71.268.962.232,00
36	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan	9.160.216.463,00
37	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	90.990.000,00
38	Program Pelayanan Kedinasan	25.310.000,00
39	Program Pelayanan Kesehatan	1.669.107.500,00
40	Program Pemanfaatan Ruang	162.434.000,00

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
41	Program Pembangunan Daerah	992.498.774,00
42	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	113.238.030.722,00
43	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.014.619.700,00
44	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	55.610.343.484,00
45	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	4.902.065.000,00
46	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	200.000.000,00
47	Program Pemberantasan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	105.403.000,00
48	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya	230.903.720,00
49	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3.000.000,00
50	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	15.000.000,00
51	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	2.875.000,00
52	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	33.872.677.455,00
53	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.500.000,00
54	Program Pembinaan Anak Terlantar	26.630.000,00
55	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	438.077.200,00
56	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	27.750.000,00
57	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	370.043.300,00
58	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.785.106.400,00
59	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	3.540.689.670,00

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
60	Program Pembinaan Keagamaan	744.930.280,00
61	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	25.225.000,00
62	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	24.253.400,00
63	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3.715.000,00
64	Program Penanganan Bidang Hukum	437.032.000,00
65	Program Penanggulangan Kebakaran	43.651.250,00
66	Program Penataan Administrasi Kependudukan	927.167.700,00
67	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	233.721.135,00
68	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	33.390.000,00
69	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	10.090.787.565,00
70	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	955.886.500,00
71	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	41.945.000,00
72	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3.180.500.000,00
73	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	320.546.000,00
74	Program Pencegahan dan Pengurangan/Menghilangkan Resiko Bencana	78.210.000,00
75	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	38.300.000,00
76	Program Pendidikan Anak Usia Dini	419.484.000,00
77	Program Pendidikan Non Formal	19.734.600,00
78	Program Pendidikan Politik Masyarakat	243.561.600,00

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
79	Program Pengadaan Dan Penyiapan Peralatan dan Logistik Di Kawasan Terjadi Bencana	2.547.500.000,00
80	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	1.833.113.500,00
81	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	30.240.509.312,00
82	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	4.409.273.000,00
83	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1.129.010.000,00
84	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	627.100.000,00
85	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	505.000.001,00
86	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	1.988.411.200,00
87	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	91.540.000,00
88	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	539.211.000,00
89	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.436.880.000,00
90	Program Pengembangan Data dan Informasi	366.013.175,00
91	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	52.127.833,00
92	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	261.368.212,00
93	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	248.508.800,00
94	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	146.780.000,00
95	Program Pengembangan Kemitraan	741.007.265,00
96	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	67.021.200,00
97	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	493.930.000,00

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
98	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.967.783.980,00
99	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.067.858.208,00
100	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	10.960.000,00
101	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	945.868.250,00
102	Program Pengembangan Nilai Budaya	195.795.000,00
103	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	4.613.890.650,00
104	Program Pengembangan Perumahan	750.238.400,00
105	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	11.400.000,00
106	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	38.300.000,00
107	Program Pengembangan Usaha Perkebunan	88.255.000,00
108	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.183.949.500,00
109	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	97.060.509.100,00
110	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	8.150.000,00
111	Program Pengendalian Banjir	6.084.046.000,00
112	Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	23.827.600,00
113	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	145.291.418,00
114	Program Pengendalian Penanganan Bencana	157.661.250,00
115	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	600.500.978,00
116	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	50.000.000,00

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
117	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	356.526.500,00
118	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.533.182.958,00
119	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	874.665.534,00
120	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.289.923.500,00
121	Program Peningkatan Estetika Ruang Terbuka Hijau	74.268.800,00
122	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	689.244.100,00
123	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	24.930.477.626,00
124	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.900.915.939,00
125	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	286.505.000,00
126	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	545.978.229,00
127	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	326.095.400,00
128	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	574.363.175,00
129	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	18.884.150,00
130	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	118.686.410,00
131	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	267.953.300,00
132	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	22.146.560,00
133	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	19.167.610,00
134	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	31.924.363,00
135	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	18.500.000,00

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
136	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	7.619.813,00
137	Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	53.900.000,00
138	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	31.519.700,00
139	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	31.000.000.000,00
140	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.068.900.000,00
141	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1.077.164.000,00
142	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	184.223.900,00
143	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	3.124.651.250,00
144	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	17.500.000,00
145	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum	567.000.000,00
146	Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah	125.000.000,00
147	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	404.799.250,00
148	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	36.675.000,00
149	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	38.149.750,00
150	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	469.409.500,00
151	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	88.620.000,00
152	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	405.780.000,00
153	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	23.329.798,00
154	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	28.748.952,00

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
155	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	408.033.800,00
156	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	69.570.000,00
157	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	217.748.176,00
158	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	193.837.500,00
159	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.682.062.920,00
160	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.956.976.000,00
161	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	1.216.355.000,00
162	Program Peningkatan Sdm Petugas Teknis dan Penyuluh Perikanan	14.587.955,00
163	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.556.708.800,00
164	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	5.000.000,00
165	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	127.400.000,00
166	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	323.641.133,00
167	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	66.710.000,00
168	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1.753.250,00
169	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.613.116.368,00
170	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	106.400.000,00
171	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	241.665.685,00
172	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	61.720.000,00
173	Program Perencanaan Tata Ruang	190.275.990,00
174	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	555.643.460,00
175	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	235.347.500,00

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
176	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	9.691.000,00
177	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Laj	1.099.990.000,00
178	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana	28.779.105.000,00
179	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	22.013.538.000,00
180	Program Sistem Data Gender dan Anak	33.721.395,00
181	Program Surveilans dan Imunisasi	12.120.000,00
182	Program Tanggap Darurat di Wilayah Bencana	241.582.000,00
183	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	38.565.396.694,00
184	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	94.992.249.525,00
185	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	6.150.000,00
186	Upaya Kesehatan Lainnya	805.406.222,00
187	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	4.626.895.836,00
Jumlah Anggaran		910.696.128.898,00

Penajam, September 2020
Bupati Penajam Paser Utara



H. Abdul Gafur Mas'ud, S.E, M.E



Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13 ± 1 %	-2,34 %	-74,76
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,85 %	6,22 %	45,82
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	57.415.400.000 Rupiah	571.576.200.000 Rupiah	995,51
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	14,86 Tahun	8,28 Tahun	55,72
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,7 Tahun	12,56 Tahun	117,38
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,50 Tahun	71,41 Tahun	99,87
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai <i>Event</i> Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Medali	- Medali	-
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	69,38 %	50,02 %	72,10
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	635 Skor	- Skor	-
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	11,50 %	21,96 %	190,96
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87,64 Skor	91,00 Skor	103,83
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	75.944 Orang	14.371 Orang	18,92
		NTP	103 Indeks	- Indeks	-

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	130	WUB	60	WUB	46,15
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	450	Perizinan	937	Perizinan	208,22
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 6 Berkembang = 24 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa	Mandiri = 3 Maju = 9 Berkembang = 18 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa	Mandiri = 300% Maju = 150% Berkembang = 75% Tertinggal = 100% Sangat Tertinggal = 100%
							145
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa	%	24 kelurahan dan 30 desa	%	20,28
			82		16,63		
		Persentase kemiskinan	7,36	%	7,36	%	100
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	163,71	Km	23,15	Km	14,14
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	37,035	Ha	28,573	Ha	77,15
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99,75	%	99,72	%	99,97
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	200	SPAM	8	SPAM	4

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3	Unit	0	Unit	0
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9	Kejadian	31	Kejadian	29,03
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,50	Indeks	70,09	Indeks	100,85
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	90,55	%	92,96	%	102,66
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	20	Ha	13	Ha	65
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	70	%	63,59	%	90,84
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 24	Jam	< 6	Jam	400
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	76	%	30,89	%	40,64
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	120	Ha	185,24	Ha	154,37
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	180.567.469.806	Rupiah	88.250.948.814,26	Rupiah	48,87
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B		-		-
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	43	Aplikasi	48	Aplikasi	111,63

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0	Kasus	0	Kasus	100
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	86	%	76	%	88,37

Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2020 : Rp 913.953.279.497,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 : Rp 762.928.931.678,71



Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-74,76	98,54	-173,30
2	Pengurangan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	45,82	98,03	-52,21
3	Meningkatkan investasi di kawasan industri	Nilai investasi	995,51	93,53	901,98
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	55,72	90,06	-34,34
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	117,38	96,35	21,03
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	99,87	69,72	30,15
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan Nasional	-	98,30	-
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	72,1	96,35	-24,25
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	80,67	-
7	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	190,96	97,47	93,49
8	Meningkatkan distribusi pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan	103,83	96,65	7,18
9	Meningkatkan daya saing daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	18,92	98,09	-79,17
		NTP	-	93,82	-
		Peningkatan Jumlah WUB yang kompetitif	46,15	86,88	-40,73
10	Meningkatkan kerjasama perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani	208,22	96,08	112,14

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
11	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	Status Desa	145	81,67	63,33
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	20,28	87,98	-67,70
		Persentase kemiskinan	100	76,82	23,18
12	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	14,14	84,82	-70,68
		Luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa (Ha)	77,15	94,03	-16,88
		Persentase pemukiman yang tertata	99,97	49,19	50,78
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola masyarakat	4	99,43	-95,43
		Jumlah bangunan/ gedung terbangun	0	81,58	-81,58
		Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan	29,03	94,36	-65,33
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100,85	95,50	5,35
13	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)	102,66	68,74	33,92
		Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	65	86,83	-21,83
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	90,84	79,17	11,67
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	400	90,91	309,09
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	40,64	75,25	-34,61
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	154,37	99,75	54,62

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	48,87	75,84	-26,97
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	-	85,17	-
17	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	111,63	88,88	22,75
18	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Kasus/ konflik yang bernuansa agama	100	91,85	8,15
19	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	88,37	96,58	-8,21